

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GOLPUT DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015
(Studi Pada Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu
Kota Bandar Lampung)**

(Skripsi)

OLEH

RIZKI PRANATA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

GOLPUT FACTORS CAUSE OF MAYOR AND DEPUTY MAYOR ELECTION 2015

(Studies in Kampung Baru subdistrict of Labuhan Ratu Bandar Lampung)

By

RIZKI PRANATA

Election, in Indonesia, both the legislative elections, the presidential election or the election of regional heads is always the emergence fenomenan white group of voters or non-voters. Abstentions also occur in the mayoral election and the vice mayor of Bandar Lampung in 2015. The aim of this study was to determine the effect of the causal factors golputnya abstentions against society, the magnitude of these effects and the factors which have more influence on society golputnya village Kampung Baru subdistrict of Labuhan Queen city of Bandar Lampung. Theoretical approach used in this study is the approach of the causal factors that abstentions are psychological factors, factors of political system, political trust factor and the factor of the political system.

The method used in this research is quantitative method with type research Explanatory Research. The population in this study amounted to 90 people, the sampling technique by using purposive sampling technique. Based on the results of research and discussion, it is known that there are significant factors that abstentions penyebab the village community golputnya Kampung Baru subdistrict of Labuhan Ratu Bandar Lampung on the election of mayor and deputy mayor of Bandar Lampung in 2015. The magnitude of these effects is 48.2% and the remaining 51 , 8% influenced by other variables not ditelit. Fourth factors that cause abstentions effect as simultaneously and partially to golputnya society.

Factors that cause the most influential abstentions golputnya Kampung Baru village community is political trust factor because of political beliefs to see that the behavior of non-voters arising from a non-voters distrust towards political channels in the form of the candidate or the political party.

Keywords: Factors leading to non-voters, non-voters, the local elections

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GOLPUT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 (Studi Pada Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)

Oleh

RIZKI PRANATA

Pelaksanaan pemilu, di Indonesia baik pemilu legislatif, pemilu presiden ataupun pemilu kepala daerah selalu munculnya fenomenan pemilih golongan putih atau golput. Golput juga terjadi di pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor penyebab golput terhadap golputnya masyarakat, besarnya pengaruh tersebut dan faktor-faktor mana yang lebih berpengaruh terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan faktor-faktor penyebab golput yaitu faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan faktor sistem politik.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *Explanatory Research*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 90 orang, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa terdapat pengaruh faktor-faktor penyebab golput terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015. Besarnya pengaruh tersebut adalah 48,2% dan sisanya yaitu 51,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Keempat faktor-faktor penyebab golput berpengaruh karena secara serentak dan secara parsial terhadap golputnya masyarakat.

Faktor-faktor penyebab golput yang paling berpengaruh terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru adalah faktor kepercayaan politik karena faktor kepercayaan politik yang melihat bahwa perilaku golput muncul akibat dari ketidakpercayaan seorang golput terhadap saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai politik

Kata kunci : Faktor-faktor penyebab golput, golput, pemilihan kepala daerah

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GOLPUT DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2015
(Studi Pada Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu
Kota Bandar Lampung)**

OLEH

RIZKI PRANATA

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

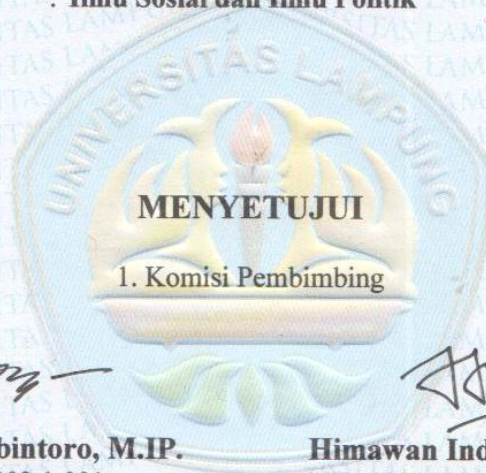
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB GOLPUT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2015 (Studi pada Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Rizki Pranata**

No. Pokok Mahasiswa : **1216021099**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001


Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.
NIP 19830727 200912 1 009

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.
NIP 19600729 199010 1 001

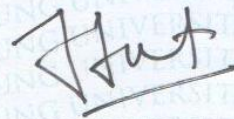
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

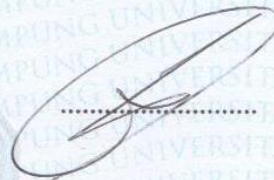
Ketua : **Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**



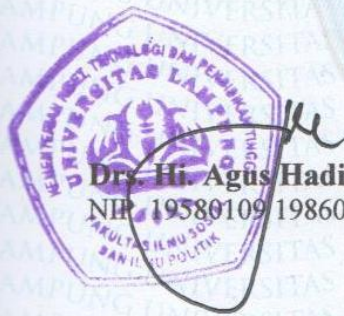
Sekretaris : **Himawan Indrajat, S.IP., M.Si.**



Penguji : **Dr. Suwondo, M.A.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002

Tanggal Lulus Ujian : **07 September 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan saya, rumusan dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karnya karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 7 September 2016
Yang Membuat Pernyataan,



Rizki Pranata
NPM. 1216021099

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 21 September 1993, penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara pasangan bapak Tarmizi dan ibu Seprida Sari, S.Pd.

Penulis mengawali pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Unila Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan pendidikan formal di SD Negeri 2 Raja Basa dan lulus pada tahun 2006. Pendidikan menengah atas di tempuh di SMP Negeri 9 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2009. Pendidikan menengah atas di tempuh di SMA Negeri 5 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur masuk Undangan (jalur nilai).

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah memperoleh beasiswa PPA sebanyak 1 kali selama 1 tahun. Penulis juga pernah mengabdikan diri kepada masyarakat saat melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Umbar kecamatan Kelumbayan kabupaten Tanggamus pada tahun 2015.

MOTTO

HIDUP ADALAH PERJUANGAN LEBIH BAIK MENCoba DARI PADA
TIDAK SAMA SEKALI

KEAJAIBAN HANYA AKAN MENCUL KETIKA UPAYA TELAH
DIMAKSIMALKAN

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah... dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, ku persembahkan karya sederhana ini untuk :

Ayah dan ibu

Atas kasih sayang dan kesabarannya, terimakasih atas keiklasan dan ketulusan serta doa yang telah kalian peruntukan untukku.

Adik tersayang Sindi aulia kakak-kakakku Mizdar Madi S.Ip dan Selvina S.P,d terimakasih telah memberikan semangat dan masukannya. berbagi cerita, canda, tawa dan kesedihan sehingga rumah kita menjadi begitu berwarna. Semoga apa yang kita jalan baik yang kita lakukan selalu diridhoi Allah dan dapat membagikan dan membahagiakan ayah dan ibu

Keluarga besar, sahabat dan teman-teman

Terimakasih atas segala bantuannya selama ini dan kebersamaanya selama ini

Almamater tercinta

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

SANWACANA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Faktor-Faktor Penyebab Golput Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015*” (*Studi Pada Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung*). Skripsi ini disusun sebagai salah syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, bimbingan, nasehat, saran, dan perhatian dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas bantuannya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan

bantuan, nasehat, saran, dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan studi.

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing Utama atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan, saran, nasehat, dan masukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Himawan Indrajad S.Ip M.Si selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan pelajaran, arahan, bimbingan, saran, dan motivasi sehingga penulis mampu memperbaiki kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Suwondo M.A. selaku dosen pembahas dan penguji atas segala masukan, kritik, dan saran yang bermanfaat bagi penulis sehingga skripsi ini menjadi lebih bermakna dan berarti.
6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan banyak pelajaran berharga baik akademik maupun moral selama menempuh pendidikan.
7. Bapak dan Ibu staf administrasi di Jurusan maupun di Dekanat yang telah memberikan bantuan demi terselesaikannya semua proses pembelajaran dan skripsi ini.
8. Seluruh Staf dan Karyawan, serta Kiyai-Kiyai di FISIP terimakasih atas bantuannya selama penulis menimba ilmu di Kampus.
9. Kedua Orang Tuaka (Ibu dan Bapak) atas kasih sayang dan do'anya kepada penulis selama ini.

10. Kakak-adik tersayang Kiyai Mizdar Madi, Atu Selvina, dan adik Sindi Aulia terimakasih atas dukungannya.
11. Bapak Sukirman B.A selaku lurah Kampung Baru, seluruh staf kelurahan Kampung Baru, ketua PPS kelurahan Kampung Baru, dan Ketua RT di TPS 2, TPS 5 dan TPS 11 terimakasih atas segala bantuannya.
12. Sahabat-sahabatku, serta seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 12 Rizky Satria, Dedek Renaldo, Evan Sarli Rakasiwi, Dwi Dian Kusuma, Guntur Ardyan Tamara, Budi Santoso, Wahid Nur Rohman, Yoga Swasono, Bagas Aji Satrio, Primadya Rosa Ayu, Nevia Setiana, Lintang Yunita Afriani, soulmate Ari Hervina, Ananda Putri Sujatmiko dan teman-teman angkatan yang lain.
13. Teman/Sahabat/Saudara senasib dan sepenanggungan Zainal Arifin, Sulistyio Adi Rukmono, Muhammad Renaldy dan Muhammad Ikhsan. Ingatlah kita pernah berucap bahwa “*Kita Berteman Lebih Dari Saudara*” semoga hubungan kita selalu baik dan kita dapat meraih mimpi-mimpi kita.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan pahala dari sisi Allah SWT. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, September 2016
Penulis

Rizki Pranata

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR DIAGRAM	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum	15
1. Pemilihan Umum.....	15
2. Pemilihan Kepala Daerah.....	20
3. Dasar Hukum Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015	23
B. Tinjauan Tentang Konsep Golongan Putih (Golput).....	24
C. Tinjauan Tentang Prilaku Tidak Memilih (Golput)	25
1. Perilaku.....	25
2. Perilaku Politik.....	27
3. Perilaku Pemilih	29
4. Perilaku Golput (Tidak Memilih).....	30
5. Kategori dan Implikasi Golput	33
D. Faktor-Faktor Golput (Pendekatan Golput)	37
E. Kerangka Pikir	46
F. Hipotesis.....	52

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	54
B. Definisi Konseptual.....	55
C. Definisi Oprasional	56
D. Lokasi Penelitian	57
E. Populasi dan Sampel	58
F. Sumber Data	61
G. Teknik Pengumpulan Data	63

H. Teknik Pengolahan Data	65
I. Teknik Penentuan Skor	66
J. Uji Validitas dan Reabilitas.....	67
K. Teknik Analisa Data	72
L. Analisis Data Kuantitatif	73
1. Uji t (Pengaruh Parsial)	73
2. Uji Regresi Berganda dan Persamaan Regresi Berganda.....	74
3. Uji F	74
4. Uji R ² (Koefisien Determinasi)	75

IV. Gambaran Umum

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	77
1. Profil Kota Bandar Lampung	77
2. Gambaran Umum Kelurahan Kampung Baru.....	79
a. Sejarah Kelurahan Kampung Baru	79
b. Letak Geografis	80
c. Keadaan Demografi.....	81
d. Visi dan Misi	83
e. Pilkada walikota dan wakil walikota kota Bandar Lampung tahun 2015 di kelurahan Kampung Baru.....	84

V. Hasil dan Pembahasan

A. Deskripsi Responden.....	85
B. Deskripsi data	91
1. Deskripsi Variabel Faktor-Faktor Penyebab Golput (X)	91
a. Faktor Psikologis	91
b. Faktor Sistem Politik	99
c. Faktor Kepercayaan Politik	108
d. Faktor Latar Belakang status Sosial-Ekonomi	117
2. Deskripsi Variabel Golput (Y)	137
C. Analisa Data Kuantitatif	152
1. Uji t (Pengaruh Parsial) / Uji Hipotesis Minor	152
2. Uji Regresi Berganda atau Persamaan Regresi Berganda.....	155
3. Uji F / Uji Hipotesis Mayor	159
4. Uji R ² (Koefisien Determinan)	161
D. Analisa Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab Golput Terhadap Golputnya Masyarakat Kampung Baru.....	163
1. Pengaruh Faktor-Faktor Penyebab Golput Terhadap Golputnya Masyarakat Kampung Baru.	163
2. Besarnya pengaruh faktor-faktor penyebab golput terhadap golputnya masyarakat Kampung Baru.	166
a. Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Golputnya Masyarakat Kampung Baru.	166
b. Pengaruh Faktor Sistem Politik Terhadap Golputnya Masyarakat Kampung Baru.	168

c. Pengaruh Faktor Kepercayaan Politik Terhadap Golputnya Masyarakat Kampung Baru	171
d. Pengaruh Faktor Latar Belakang Status Sosial-Ekonomi Terhadap Golputnya Masyarakat Kampung Baru	173
3. Faktor Penyebab Golput Yang Paling Berpengaruh Terhadap Golputnya Masyarakat Kampung Baru.	175
4. Golputnya Masyarakat Kampung Baru	176

VI. Simpulan dan Saran

A. Simpulan.....	179
B. Saran	181

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1. Rekapitulasi Hasil Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2015		5
2. Rekapitulasi Hasil Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2005,2010,dan 2015		6
3. Partisipasi Kelurahan Kampung Baru Pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015		7
4. Penelitian Terdahulu Yang Meneliti Mengenai Perilaku Tidak Memilih Atau Golongan Putih (Golput)		11
5. Definisi Oprasional.....		56
6. Distribusi Sampel		60
7. validitas variabel faktor-faktor penyebab golput.....		68
8. validitas variabel golput		69
9. Nilai Interpretasi Reliabel		71
10. Reabilitas instrumen penelitian		71
11. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi.....		76
12. Nama Kecamatan, Ibukota, Jumlah Kelurahan, dan Luas Wilayah Kota Bandar Lampung per-Kecamatan (km ²).....		78
13. Distribusi responden menurut umur		85
14. distribusi responden menurut jenis kelamin.....		87
15. distribusi responden menurut status pekerjaan		88
16. distribusi responden menurut pendidikan.....		89

17. Tanggapan responden tentang keberminatan terhadap aktifitas politik di kota Bandar Lampung	92
18. Tanggapan responden tentang sosialisasi kandidat pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015	95
19. Tanggapan responden tentang relevansi visi dan misi kandidat pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015 terhadap permasalahan di kota Bandar Lampung.....	97
20. Tanggapan responden tentang pemahaman terhadap penyelenggaraan pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015.....	100
21. Tanggapan responden tentang penerimaan informasi mengenai pilkada Bandar Lampung tahun 2015 dari tokoh masyarakat, KPU, dan sebagainya	102
22. Tanggapan responden tentang kinerja panitia penyelenggara pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015 (KPU kota Bandar Lampung, PPK dan PPS)	104
23. Tanggapan responden tentang kinerja petahana/Incumbe yang kota Bandar Lampung berpengaruh terhadap penggunaan hak suara bapak/ibu saudara/i dalam pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015	106
24. Tanggapan responden tentang kedekatan kandidat pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015 dengan masyarakat kota Bandar Lampung	109
25. Tanggapan responden tentang kepercayaan responden terhadap diri kandidat pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015.....	111
26. Tanggapan responden tentang kompetensi/ kapabilitas kandidat pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015.....	113
27. Tanggapan responden tentang adakah tokoh diluar kandidat yang berkompentensi namun tidak maju dalam pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015, yang memiliki kapabilitas baik sebagai calon walikota	115
28. Tanggapan responden tentang, Apakah pendidikan formal yang sudah anda dapatkan/lalui (SD,SMP,SMA dan Seterusnya) membuat anda memahami manfaat memilih dalam pilkada	118
29. Tanggapan responden tentang, Apakah anda sulit/susah menerima informasi pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015 dari surat kabar dan televisi	120
30. Tanggapan responden tentang, Apakah anda memiliki waktu yang cukup untuk menerima informasi pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015	122

31. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah dengan adanya pemilu kota Bandar Lampung membawa perubahan pada pendapatan anda.....	125
32. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah pendapatan anda mencukupi kehidupan sehari-hari	127
33. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah anda lebih memilih bekerja dari pada datang ke TPS untuk memberikan hak suara pada saat Pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015	129
34. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah anda terikat oleh waktu kerja sehingga tidak mudah izin atau tempat pekerjaan anda tidak memberikan izin/libur pada saat pilkada.....	131
35. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah pekerjaan anda berhubungan langsung dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan	133
36. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah pilkada kota Bandar Lampung mempengaruhi pada pekerjaan anda	134
37. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah anda tidak memilih pada pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015, dikarenakan anda berhalangan hadir.....	137
38. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah anda tidak memilih pada pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015, dikarna anda tidak punya pilihan kandidat	139
39. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah anda tidak memilih, dikarenakan anda pesimistis bahwa pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015 akan membawa perubahan dan perbaikan (kehidupan berbangsa bernegara).....	142
40. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah anda tidak memilih pada pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015, dikarenakan anda tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang berjalan.....	144
41. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah anda tidak memilih pada pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015, dikarenakan anda tidak memilih karna kandidat bersebrangan ideologi.....	147
42. Tanggapan responden tentang pertanyaan, Apakah anda tidak memilih, dikarenakan anda merasa memiliki atau tidak memilih pada pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015 tidak memiliki dampak untuk anda	149
43. Hasil Uji t / Uji Hipotesis Minor	153
44. Hasil Uji Regresi Berganda	156

45. Hasil Uji F / Uji Hipotesis Mayor	159
46. Hasil Uji R^2 (Koefisien Determinan)	161

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1. Distribusi responden menurut umur.....	86
2. Distribusi responden menurut jenis kelamin.....	87
3. Distribusi responden menurut status pekerjaan	88
4. Distribusi responden menurut pendidikan	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bangan Kerangka Pikir	51

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem negara demokrasi, dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. rakyat adalah sumber lahirnya demokrasi, bagi negara yang menganut paham demokrasi pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan (Gaffer, 2012: 36).

Dalam pemilihan umum partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting. dimana pengertian partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin. menurut Mc Closky (Budiardjo, 2008: 367) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga negara untuk mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembuatan kebijakan umum.

Melalui pemilihan umum, rakyat diberi kesempatan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang dikehendaki baik di lembaga eksekutif sebagai kepala pemerintahan

(Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota) ataupun lembaga yudikatif (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota).

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Menurut Yudistira (3:2015) pada perspektif demokrasi, pemilu memiliki setidaknya lima manfaat yaitu :

1. Pemilu adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat.
2. Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik. Melalui pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat.
3. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.
4. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan.

5. Pemilu merupakan sarana untuk membentuk perwakilan politik. Dengan kata lain Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas wakil-wakil rakyat yang terpilih untuk duduk dalam parlemen.

Kualitas pemilu dalam suatu pemilihan umum dapat terlihat dari jumlah partisipasi pemilih, semakin tinggi partisipasi pemilih dalam pemilu sesungguhnya menunjukkan besar legitimasi politik pemenang pemilu dan dapat menggambarkan bahwasanya masih besar kepercayaan rakyat akan harapan dari hasil pemilu.

Tingginya tingkat partisipasi dalam pemilihan umum juga dapat menunjukkan bahwa rakyat memahami masalah-masalah politik dan ingin terlibat dalam kegiatan politik. Sebaliknya rendahnya partisipasi rakyat pada pemilu dianggap ancaman dari demokrasi. Partisipasi yang rendah dapat asumsikan bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan dapat juga diasumsikan rendahnya partisipasi sebagai ketidakpercayaan rakyat terhadap hasil pemilu yang akan membawa perubahan. Fenomen golput juga dianggap sebagai ancaman bagi demokrasi, dikatakan ancaman karna golput dinilai tidak mendukung adanya pesta demokrasi.

Besarnya angka tidak memilih atau golongan putih (Golput) atau disebut juga *voter's turn out* (VTO) ini jika melebihi angka pemenang pemilu maka sulit membangun logika bahwasanya kandidat pemenang pemilu merupakan

representatif pilihan masyarakat, dan hal ini juga tidak serta merta menjamin pemerintahan yang terbentuk mendapatkan dukungan maksimal dari masyarakat. Partisipasi yang rendah ini erat kaitannya dengan perilaku tidak memilih (golput), golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu.

Pelaksanaan pemilu, di Indonesia baik pemilu legislatif, pemilu presiden ataupun pemilu kepala daerah selalu munculnya fenomena pemilih golongan putih atau golput. Contohnya pada penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Kampar Provinsi Sulawesi Selatan. Yatarullah (2015: 5) Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, dari 560.928 pemilih yang terdaftar hanya 365.047 pemilih 65,08% dan golput 195.881 atau golput sebesar 33,92%.

Pada tanggal 9 desember 2015 telah dilaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala Daerah serentak di 269 daerah di Indonesia. Salah satunya adalah pemilihan umum walikota dan wakil walikota Bandar Lampung. Dasar hukum dari pelaksanaan pemilihan umum serentak ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 201 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan di hari dan bulan yang sama pada tahun 2015”

Tabel : 1. Rekapitulasi Hasil Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Pemilu	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Partisipasi	Golput	Persentasi Golput
Pilkada Kota Bandar Lampung 2015	630.366	419.994	210.372	33.37%

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung.

Dari data yang telah dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bandar Lampung pada pemilihan walikota dan wakil waikota Bandar Lampung tahun 2015. Dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) kota Bandar Lampung jumlah pemilih sebesar 630.366. pengguna hak pilih sebesar 419.994 dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 210.372 atau 33.37% pemilih yang golput.

Pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015 masih menyisakan permasalahan terkait fenomena politis. Fenomena ini terkait dengan masyarakat sebagai pemilih golput dalam Pilwakot tersebut. Golput adalah pihak yang tidak melakukan partisipasi dalam pemilihan karena suatu alasan atau tujuan yang jelas sehingga tidak menggunakan hak pilihnya.

Tabel : 2. Rekapitulasi Hasil Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2005, 2010, dan 2015

Pemilu	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Partisipasi	Golput	Persentase golput
Pilkada Kota Bandar Lampung 2005	542.611	307.552	235.059	43,32%
Pilkada Kota Bandar Lampung 2010	627.954	370.031	257.923	41,07%
Pilkada Kota Bandar Lampung 2015	630.366	419.994	210.372	33,37%

Sumber : KPU Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data partisipasi 3 Pilkada walikota kota Bandar Lampung, disetiap pelaksanaan pilkada walikota mengalami penurunan angka golput. Tahun 2005 tercatat angka golput 43,34%. kemudian menurun menjadi 41,07% pemilih golput di tahun 2010, dan angka golput menurun kembali menjadi 33,37% di tahun 2015. Meskipun di tiga tahun pelaksanaan pilkada walikota Bandar Lampung mengalami penurunan angka golput, namun angka Golput masih besar di atas angka 30% jika dibandingkan dengan kabupaten Pesisir Barat yang hanya 21,16% yang merupakan kabupaten baru di Provinsi Lampung. (<http://www.kpu-bandarLampung.go.id>)

Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015 berbeda di tiap daerah pemilihan. Dari sejumlah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Bandar Lampung mencatat tiga partisipasi terendah. Yaitu kelurahan Kampung Baru kecamatan Labuhan Ratu merupakan

daerah dengan partisipasi terendah dengan tingkat partisipasi pemilih hanya mencapai 44% atau 56% pemilih yang golput, Kelurahan Rawa Laut Kecamatan Enggal dengan 45% atau 55% pemilih yang golput, Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Way Halim dan yang hanya 49% atau 51% pemilih yang golput. (<http://www.kpu-bandarLampung.go.id>).

Kelurahan Kampung Baru di kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang dihimpun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung untuk Pilkada walikota dan wakil walikota Kota Bandar Lampung tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel .3. Partisipasi Kelurahan Kampung Baru Pada Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015

TPS	DPT	PASANGAN CALON			SAH	TID -AK SAH	PARTIS -IPASI	GOL- PUT	PERS ENTA -SE GOLP -UT
		Yunus- muslimim	Herman- yusuf	Tabroni- komarunizar					
1	395	3	133	13	149	0	149	246	62,2%
2	378	0	84	4	88	0	88	290	76,7%
3	457	3	166	14	183	3	186	271	59,2%
4	353	3	134	3	140	3	143	210	59,4%
5	439	5	95	8	108	4	112	327	74,4%
6	478	5	185	16	206	2	208	270	56,4%
7	525	5	223	16	244	0	244	281	53,5%
8	310	4	220	20	244	1	245	65	20,9%
9	273	2	185	9	196	3	199	74	27,1%
10	502	1	184	8	193	8	201	301	61,7%
11	419	5	116	11	132	5	137	282	67,3%
12	451	2	267	17	286	0	286	165	36,5%

TOT -AL	4980	38	1992	139	2169	29	2198	2782
------------	------	----	------	-----	------	----	------	------

Sumber : Rekapitulasi hasil pilkada kota Bandar Lampung kelurahan Kampung Baru.

Berdasarkan tabel di atas pilkada walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 4.980, dengan pengguna hak suara sebesar 2.198 dan 2.782 pemilih yang tidak menggunakan hak suara (golput) di kelurahan Kampung Baru. Jika dilihat jumlah golput dari data di atas jumlahnya lebih besar dari pada kandidat dengan suara terbanyak Herman-Yusuf yang mendapatkan suara 1992. Jika melihat fakta ini sulit untuk mengatakan bahwa pemenang pemilu merupakan representatif dari pilihan masyarakat Kampung Baru.

Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti (2010: 145) yaitu memilih atau tidak memilih dalam pemilu. Sehingga, keputusan untuk tidak memilih ini juga merupakan suatu pilihan yang memungkinkan untuk diambil. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi dari berbagai macam karakteristik perilaku politik masyarakat.

Keputusan tidak memilih merupakan perilaku individu pemilih yaitu tindakan terkait pemilihan langsung yang dipengaruhi beberapa faktor dalam buku Efriza yang berjudul "*political explore : sebuah kajian ilmu politik*". menurut Efriza (2012: 538-543) Ada 4 faktor utama yang dapat menjelaskan penyebab

masyarakat yang perilaku golput dalam pemilihan. *Pertama*, faktor psikologis yang berkaitan dengan ciri kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. *Kedua*, Faktor sistem politik yang berkaitan dengan sistem politik khususnya sistem pemilu secara langsung.

Ketiga, faktor kepercayaan politik muncul ketidakpercayaan pada saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai. *Keempat*, Faktor latar belakang status sosial-ekonomi adanya korelasi antara ketidakhadiran dalam pemilu dengan tingkat status sosial-ekonomi, yang terdiri dari tiga indikator meliputi, tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Pengaruh faktor-faktor tersebut tidak menutup kemungkinan seorang pemilih menunjukkan perilaku tidak memilih atau lebih dikenal dengan golput. fenomena politik dari golput ini merupakan salah satu bentuk dalam kehidupan berdemokrasi.

Berdasarkan hasil prariset yang dilakukan peneliti dengan masyarakat kelurahan Kampung Baru yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Bapak Irawan warga lingkungan kampus hijau diketahui alasan golput adalah ia tidak percaya dengan ketiga figur calon, suara yang dimiliki tidak berpengaruh terhadap hasil pemilu, dan lebih mementingkan pekerjaannya. (*prariset: tanggal 13 januari 2016 jam 16:00*)

Hal ini di perkuat dengan keterangan bapak Thahuruddin stap kelurahan Kampung Baru bagian umum. Tingginya angka golput masyarakat Kampung

Baru disebabkan, masyarakat tidak percaya akan janji para kandidat akan ditepati, pesimis akan hasil pemilu akan membawa perubahan pada kehidupan berbangsa dan bernegara, dan masyarakat lebih mementingkan pekerjaan.
(prariset: tanggal 6 april 2016 jam 10:00)

Beberapa hal penting tentang kenapa pemilih harus menggunakan hak pilihnya dengan baik antara lain:

1. Pilihan untuk tidak memilih (Golput) merupakan bentuk pemborosan terhadap Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD).
2. Golput juga akan menguntungkan calon yang belum tentu berkualitas atau disukai. Artinya, calon bisa menang hanya dengan perolehan suara rendah atau hanya mempunyai basis massa sedikit karena lebih banyak masyarakat yang golput, Ini mengakibatkan legitimasi kekuasaan calon terpilih akan berkurang. Dalam pemilihan secara langsung seperti saat ini, maka calon yang terpilih akan merasa bahwa ia pilihan “rakyat” dan bebas melakukan apa yang dikehendaknya. Justru hal ini menjadi bumerang bagi golput.

Masyarakat golongan putih terbagi atas dua bagian, yaitu masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan. Penelitian ini akan meneliti masyarakat golongan putih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetapi namun tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015. Dalam riset-riset perilaku pemilih yang telah diadakan

sebelumnya, golput juga belum menjadi prioritas. Beberapa riset dan survey dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, fokus riset pada umumnya belum ditujukan pada kecenderungan pemilih golput terhadap para kandidat maupun partai, model riset dan survey yang dilakukan ini hanya mampu menprediksi kecenderungan suara golput yang akan muncul pada saat pemilihan.

**Tabel : 4. Penelitian Terdahulu
Berikut Beberapa Penelitian Terdahulu Yang Meneliti Mengenai Perilaku
Tidak Memilih Atau Golongan Putih (Golput)**

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Arie Setiawan	2012	Perilaku Golput Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Waringin Barat Kecamatan Sukorojo Kabupaten Prengsewu	Dari penelitian ini hal menjadi penyebab masyarakat tidak memilih disebabkan faktor-faktor teknis seperti harus bekerja, libur, dan harus kuliah. Dan faktor kedua adalah faktor politis dimana masyarakat menilai keadaan desa akan sama saja dan siapapun kepala desa tidak akan mengubah keadaan itu.
2	Rike Prisina	2015	Fenomena Golongan Putih di Kalangan Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2015	Mahasiswa yang melakukan golput termasuk dalam tipe idiealis konfrontatif, idiealis realis, oportunis, professional, glamour. Perilaku golput mahasiswa pada penelitian ini termasuk ke dalam golput teknis dan golput politis tetapi bukan termasuk ke dalam kategori golput ideologis

Sumber : Di Olah Oleh Peneliti

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Arie Setiawan dalam skripsinya Perilaku Golput Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Waringin Barat

Kecamatan Sukorojo Kabupaten Prengsewu. Menjelaskan penyebab golput dalam pemilihan kepala desa Waringin Barat kecamatan Sukorojo Kabupaten Prengsewu disebabkan faktor-faktor teknis seperti harus bekerja, libur, dan harus kuliah. Dan faktor kedua adalah faktor politis dimana masyarakat menilai keadaan desa akan sama saja dan siapapun kepala desa tidak akan mengubah keadaan itu.

Sedangkan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rike Prisina dengan judul Fenomena Golongan Putih di Kalangan Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2015 menjelaskan Mahasiswa yang melakukan golput termasuk dalam tipe idiealis konfrontatif, idiealis realis, oportunis, professional, glamour. Perilaku golput mahasiswa pada penelitian ini termasuk ke dalam golput teknis dan golput politis tetapi bukan termasuk ke dalam kategori golput ideologis.

Penelitian ini akan mencoba mengungkapkan pengaruh faktor-faktor penyebab golput terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dengan menggunakan 4 faktor-faktor golput yaitu faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi dan juga mengungkapkan faktor manakah yang lebih dominan mempengaruhi masyarakat untuk berperilaku golput. Jika penelitian sebelumnya menggunakan jenis penelitian kualitatif maka penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian Kuantitatif.

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelurahan Kampung Baru. Kelurahan Kampung Baru di kecamatan Labuhan Ratu dipilih sebagai lokasi penelitian, karena Kampung Baru merupakan daerah pemilihan dengan tingkat partisipasi pemilihan kepala daerah yang terendah pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015 atau dengan angka golput sebesar 56%. Beranjak dari realitas di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Faktor-Faktor Penyebab Golput Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat peneliti kemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah faktor-faktor penyebab golput; faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi yang menyebabkan terjadinya golput dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung Tahun 2015 di kelurahan Kampung Baru, kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik

dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi menjadi penyebab pemilih untuk menjadi golput di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2015.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan pembaca mengenai kajian politik, khususnya yang berkaitan dengan teori/pendekatan perilaku golput dalam pemilu di Indonesia.

2. Secara Praktis

Manfaat hasil penelitian ini memberikan gambaran dan penjelasan mengenai penyebab perilaku golput masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan input terhadap implementasi pemilu oleh *stakeholders* pemilu yaitu KPU Kota Bandar Lampung serta sebagai bahan untuk perumusan kebijakan manajemen pemilu di Kota Bandar Lampung, serta partai politik dan kandidat yang akan maju pada pemilihan mendatang agar dapat mencari solusi terkait perilaku tidak memilih atau golput masyarakat kelurahan Kampung Baru sehingga jumlahnya dapat berkurang /pada pemilihan mendatang.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

1. Pemilihan Umum

Berdasarkan UUD 1945 Bab I Pasal 1 ayat (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilak

ukan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi modern yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat yang ditentukan sendiri oleh rakyat. Untuk menentukan siapakah yang berwenang mewakili rakyat maka dilaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah suatu cara memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta salah satu pelayanan hak-hak asasi warga negara dalam bidang politik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum dinyatakan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pemilu adalah sarana mewujudkan pola kedaulatan rakyat yang demokratis dengan cara memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena pemilu merupakan hak asasi manusia maka pemilu 2015 warga negara yang terdaftar pada daftar calon pemilih berhak memilih langsung kepala daerah.

1. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Asas Pemilihan Umum

Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945, Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil:

- a. Langsung, Yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. Umum, Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu sudah berumur 17 tahun atau telah pernah kawin, berhak ikut memilih dalam pemilu. Warga negara yang sudah berumur 21 tahun berhak dipilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
- c. Bebas, Setiap warga negara yang memilih menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun/dengan apapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
- d. Rahasia, Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan cara apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak

dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya akan diberikan.

- e. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu setiap penyelenggara/pelaksana pemilu, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas, dan pemantau pemilu, termasuk pemilih serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Adil, Berarti dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilih dan parpol peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

3. Sistem Pemilihan Umum

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: “*single member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik) dan *multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan *proportional Representation* atau sistem (Perwakilan Berimbang)”.

a. *Single-member Constituency* (Sistem Distrik)

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi), mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah pemilihan dibagi dalam sejumlah besar distrik dan

jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan ditentukan oleh jumlah distrik. Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam pemilu umum legislatif tahun 2014 ini menggunakan sistem distrik.

b. *Multi-member Constituency* (sistem Perwakilan Berimbang)

Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *proportional representation* atau sistem perwakilan berimbang. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Gagasan pokoknya adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Untuk keperluan ini diperlukan suatu pertimbangan. Jumlah total anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan atas dasar pertimbangan dimana setiap daerah pemilihan memiliki sejumlah wakil sesuai dengan banyaknya penduduk dalam daerah pemilihan itu.

Memilih secara langsung dalam pemilu kepala daerah, memilih wakil-wakil mereka yang akan duduk di eksekutif Kabupaten/Kota. Pemilihan umum kepala daerah kabupaten/kota tahun 2015 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka, dimana rakyat dapat mengetahui siapa saja calon wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan. Dengan adanya sistem pemilihan umum yang terbuka inilah diharapkan dapat memilih wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan benar-benar mewakili aspirasi, keragaman, kondisi, serta keinginan dari rakyat yang memilihnya.

2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah merupakan suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat, rakyat menyeleksi secara langsung putra-putra terbaik dari daerah mereka. Mampu memimpin dan membawa daerahnya menjadi lebih baik dan lebih maju, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Pemilihan kepala daerah merupakan tanggung jawab langsung oleh masyarakat setempat demi kemajuan daerah mereka masing-masing.

Menurut Cangara (2011: 210) dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus dilakukan pemilihan langsung.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang sering disebut sebagai Pilkada menjadi sebuah perjalanan sejarah baru dalam dinamika kehidupan berbangsa di Indonesia. Perubahan sistem pemilihan mulai dari pemilihan Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang dekat dan menjadi idaman seluruh lapisan masyarakat.

Esensi demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat yang dimanifestasikan melalui pemilihan yang langsung dilakukan oleh masyarakat dan diselenggarakan dengan jujur, adil, dan aman. Seperti yang diungkap Abdul Asri (Harahap, 2005: 122), mengatakan bahwa:

“Pemilihan kepala daerah langsung merupakan tonggak demokrasi terpenting di daerah, tidak hanya terbatas pada mekanisme pemilihannya yang lebih demokratis dan berbeda dengan sebelumnya tetapi merupakan ajang pembelajaran politik terbaik dan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Melalui Pemilihan kepala daerah langsung rakyat semakin berdaulat, dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya dimana kepala daerah ditentukan oleh sejumlah anggota DPRD. Sekarang seluruh rakyat yang mempunyai hak pilih dan dapat menggunakan hak suaranya secara langsung dan terbuka untuk memilih kepala daerahnya sendiri. Inilah esensi dari demokrasi dimana kedaulatan ada sepenuhnya ada ditangan rakyat, sehingga berbagi distorsi demokrasi dapat ditekan seminimal mungkin”.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, maka pada hakikatnya Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah peristiwa luar biasa yang dapat membuat perubahan berarti bagi daerah. Ini merupakan suatu cara dari kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari demokrasi. Oleh karena itu, esensi dari demokrasi yang melekat pada Pemilihan kepala daerah hendaknya disambut masyarakat secara sadar dan cerdas dalam menggunakan hak politiknya. Partisipasi, aktif, cermat, dan jeli hendaknya menjadi bentuk kesadaran politik yang harus dimiliki oleh masyarakat daerah dalam Pemilihan kepala daerah ini.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang :Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. adalah sebagai berikut :

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”

Pemilihan Kepala Daerah langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945. Seperti telah diamanatkan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pemilihan Umum Kepala Daerah secara langsung, memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam politik, agar terciptanya demokrasi dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari penerapan demokrasi di Indonesia, Pemilihan kepala daerah dilakukan untuk memilih orang-orang yang akan memiliki

jabatan-jabatan ditingkat lokal atau daerah. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat dalam pemilihan umum untuk memilih orang-orang yang akan mewakili mereka dalam menjalankan pemerintahan.

3. Dasar Hukum Pemilu Kepala Daerah Tahun 2015

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Menyatakan bahwa:

“Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015.”

Berdasarkan atas dasar hukum di atas kemudian pada tanggal 9 desember tahun 2015 diadakanlah pemilihan kepala daerah serentak di 269 daerah di Indonesia. Salah satunya adalah pemilihan umum walikota dan wakil walikota Bandar Lampung.

B. Tinjauan Tentang Konsep Golongan Putih (Golput)

Menurut Dulay (Efriza, 2012: 532) golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam even pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilu legeslatif, pilpres, pilkada, maupun pemilihan kepala desa. Sedangkan menurut Budiman (Efriza, 2012: 535) golput adalah orang yang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat pilihannya tidak sah dengan mencoblos gambar putih. Kita bisa memperluas definisi golput dengan orang yang tidak percaya dengan hasil pemilu dan tidak mau berpartisipasi. Ia tidak bisa datang ke TPS atau datang tetapi membuat suara tidak sah.

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat diasumsikan bahwa golongan putih (golput) adalah individu atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena berbagai macam alasan. Pada penelitian ini yang dimaksud golput adalah para masyarakat kelurahan Kampung Baru kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota tahun 2015 dikarenakan berbagai alasan.

C. Tinjauan Tentang Perilaku Tidak Memilih (Golput)

1. Perilaku

Perilaku berasal dari bahasa Inggris yaitu "*Behaviour*" adalah tingkah laku individu atau manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Sedangkan Menurut Notoatmodjo (Pasolong, 2010: 70) perilaku adalah "tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya".

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia secara langsung atau tidak langsung, baik yang diamati langsung maupun yang tidak langsung. Semua aktivitas dalam kehidupan manusia merupakan bentuk-bentuk perilaku disengaja maupun tidak disengaja. Dalam kacamata politik perilaku tentu memiliki arti tersendiri karena perilaku politik dilihat dari fenomena politik yang sedang maupun telah berlangsung.

Oleh karena itu, perilaku tidak lepas dari aktivitas kehidupan manusia sehari-hari, apalagi sekarang perilaku bisa mencerminkan diri sikap seseorang. Seperti contohnya apabila seseorang itu berbuat menyimpang akan dicap jelek bagi masyarakat dan apabila seseorang atau individu itu berbuat baik maka orang yang disekitarnya akan mengenalnya sebagai orang yang baik

pula. Dan tidak itu saja perilaku bisa menjadi penilaian seseorang melihatnya contohnya seperti disekolah, ditempat kerja dan lain-lain.

Menurut Ndraha (Pasolong, 2010: 71) perilaku adalah operasionalisasi dan aktualisasi sikap seseorang atau satu kelompok dalam atau terhadap suatu (situasi dan kondisi) lingkungan masyarakat, alam, teknologi dan organisasi. Maksud dari pendapat di atas perilaku adalah sikap seseorang atau individu yang bisa menempatkan situasi dan kondisi yang dihadapinya apabila terjun dilingkungan masyarakat dan organisasi.

Dari pernyataan Ndaraha di atas menunjukkan bahwa tingkah laku setiap orang selalu merupakan aktualisasi sikap seseorang atau kelompok terhadap situasi dan kondisi yang ada. Dalam penelitian ini situasi dan kondisi yang ada dimanifestasikan dalam keadaan dan situasi politik yang ada. Sehingga perilaku seseorang dilihat dari situasi dan kondisi perpolitikan sehingga dapat ditemukan perilaku tersebut dalam bingkai situasi politik. Situasi politik tentu merupakan situasi yang ada di tengah kehidupan sosial dan masyarakat yang ada.

Kehidupan politik berada di tengah-tengah kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga perilaku tersebut diidentifikasi dalam keadaan masyarakat secara keseluruhan dalam aktifitas politik yang ada. Perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat juga dari tujuan tujuan perilaku yang

dilakukan oleh individu tersebut. Tujuan tujuan dapat dikategorikan sebagai tujuan ekonomi, sosial, budaya dan politik.

2. Perilaku Politik

Menurut Almond dan Powel, Efriza (2012: 126) “perilaku politik adalah sebagai keseluruhan tingkah laku politik para aktor politik dan warga negara yang dalam manifestasi konkretnya telaah saling memiliki hubungan dengan kultur politik”. Perilaku politik dari pernyataan dari pakar politik Almond dan Powel di atas menggambarkan suatu pemikiran bahwa keseluruhan tingkah laku politik dilakukan oleh para aktor politik sebagai pemain langsung aktifitas politik dan warga negara dalam hal ini masyarakat yang menikmati kebijakan setiap aktor politik. Hubungan antara aktor politik dan warga negara dalam khazanah ilmu politik banyak mendapatkan perhatian karena hubungan keduanya merupakan hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Perilaku politik adalah keseluruhan tingkah laku para aktor politik untuk mendapatkan kekuasaan, mempertahankannya dan kemudian merebutnya kembali dikemudian hari, perilaku politik para aktor politik ini merupakan perilaku politik dominan dalam kehidupan politik yang ada karena aktor politik lah yang sebenarnya memainkan peranan penting tersebut, karena dari awal merebut kekuasaan para aktor politik sudah menunjukkan aktifitas

politik seperti kampanye dan lain lain yang mau tidak mau dirasakan oleh setiap masyarakat yang akan menjadi objeknya. Sementara menurut Robert K. Carr (Efriza, 2012: 126) “perilaku politik ialah sebagai suatu telaah mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Maksud dari penjelasan di atas perilaku politik adalah perbuatan individu yang sebagai suatu telaah yang bisa mempengaruhi tindakan individu apabila dalam situasi politik”.

Pernyataan di atas sangat berkaitan dengan apa yang penulis teliti, bahwa perilaku politik merupakan telaah seseorang terhadap aktifitas yang ada yang kemudian dimanifestasikan seseorang menjadi pilihannya kelak dalam tindakan politik yang diambil dalam hal ini pemilihan umum merupakan kejadian politik yang mengharuskan seseorang menelaah dengan cerdas dan kemudian melakukan pemilihan dengan baik keinginan seseorang untuk berperilaku tentu di dorong oleh *input* dan *stimulus* yang baik pula.

Sehingga hasil telaah nya berdampak pada tindakan nyata, dalam konteks penelitian ini perilaku pemilih dengan sukarela untuk menuju tempat pemilihan suara (TPS) untuk melakukan politik merupakan kesadaran sendiri yang berdasarkan telaah seseorang tersebut bahwa suatu pemilihan umum akan menjadi sarana nya untuk mendapatkan pemimpin yang baik dan dapat melakukan perubahan yang berarti bagi dirinya, lingkungannya maupun bangsa dan negara.

3. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih dalam pemilu merupakan salah satu bentuk perilaku politik. Pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakini agar mereka mendukung dan kemudia memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Konsep perilaku pemilih sebagai mana yang diungkapkan oleh Kristiandi (1997: 78) adalah keterkaitan seseorang untuk memberikan suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan faktor-faktor psikologi, faktor sosiologis dan faktor rasional pemilih (*voting behavior theory*) sementara perilaku pemilih menurut Mahendra (2005: 75) adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu politik tertentu.berdasrkan konsep di atas maka dapat dipahami bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan pemilihan terkait pemilihan langsung.

Perilaku pemilih merupakan perilaku politik. Menurut Surbakti (2010: 185) memandang perilaku pemilih sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang meliputi serangkaian kegiatan membuat keputusan yakni apakah memilih ataukah tidak memilih dalam pemilu. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih merupakan pikiran dan tindakan seseorang atau masyarakat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkenaan dengan kepentingan atau tujuan dalam memengaruhi proses pembuatan dan melaksanakan keputusan politik.

4. Perilaku Golput (Tidak Memilih)

Konsep perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung, tetapi ada sebuah pandangan lain yang bersebrangan dan bertolak belakang dengan konsep perilaku pemilih. Konsep tersebut adalah perilaku tidak memilih atau yang dikenal dengan sebutan golongan putih (golput). Golput sesungguhnya merupakan fenomena politik dalam sebuah negara demokrasi. Pelaku golput memiliki tujuan mendelegitimasi pemilu yang diselenggarakan pemerintah. Sisi lain yang membuktikannya adalah pemerintah yang telah memberikan ruang aspirasi bagi kepentingan kelompok ekstra parlementer. Kenyataan itu menyebabkan golput sering disebut juga sebagai barometer kualitas demokrasi.

Menurut Prihatmoko (2003: 150) golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Beberapa ahli berpandangan bahwa warga yang berhalangan hadir di tempat pemilihan suara atau TPS karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau luput dari pendaftaran, otomatis tidak termasuk kategori golput. Pandangan tersebut diperkuat dengan pandangan yang dikemukakan oleh Asfar (Efriza, 2012: 534) yang mengatakan bahwa :

“Batasan perilaku *Non voting* tidak berlaku bagi para pemilih yang tidak memilih karena faktor kelalayan atau situasi-situasi yang tidak bias di kontrol oleh pemilih, seperti karna sakit atau kondisi cuaca termasuk sedang berada di suatu wilayah tertentu seperti tempat terpencil atau ditengah hutan yang tidak memungkinkan untuk memilih. Dalam

konteks semacam ini, *Non voting* adalah suatu sikap politik yang tidak menggunakan hak pilih pada saat hari H pemilu karna faktor tidak adanya motivasi.”

Pandangan lain seperti yang dikemukakan Pahmi (2010: 65) mengatakan golput sebagai kelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan. Sejak awal ada sekelompok orang yang tidak mau didaftarkan sebagai pemilih sehingga tahapan pemilu tidak diikutinya. Selain itu ada juga sekelompok orang yang terdaftar sebagai pemilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

Golput secara tidak langsung berhubungan dengan perasaan terkait dengan rasa kepuasan atau ketidak puasan dari masyarakat itu sendiri sebagai pemilih. Ketidakhadiran dalam golput juga dapat dikaitkan dengan perhitungan untung dan rugi seseorang sebagai pemilih pernyataan ini diperkuat dengan pendapat Susan Welch (Efriza, 2012: 534) yang menyatakan sebagai berikut:

“Ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidak puasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu dia tidak akan hadir ke bilik suara begitu pula sebaliknya. Di samping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi kalau seseorang merasa lebih beruntung secara finansial dengan tidak hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan.”

Ketidakpuasan juga dapat dikaitkan sebagai bentuk protes terhadap sesuatu yang telah terjadi. Protes tersebut tentunya berhubungan dengan hal-hal politik. Menurut Samit (1992: 190) menilai golput adalah gerakan protes politik yang

didasarkan oleh problem kebangsaan. Sasaran protes pemilu yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan sasaran protes masyarakat golput adalah pemilu dan tujuanya mewujudkan demokrasi dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan sebagai dari cita-cita kemerdekaan. Golput juga merupakan bentuk ketidak puasan masyarakat terhadap objek politik, hal ini seperti yang dikemukakan Arif Budiman (Prihatmoko, 2003: 150) yang mengatakan bahwa :

“golput bukan organisasi, tanpa mengurus, dan hanya merupakan pertemuan solidaritas. Golput adalah sebuah identifikasi bagi mereka yang tidak puas dengan keadaan dan aturan main demokrasi yang diinjak-injak oleh partai politik dan pemerintah demi memenangkan pemilu dengan menggunkan aparat Negara melalui acara di luar batas aturan main demokratis. Keberadaan golput menggindikasikan bahwa proses politik yang sedang berlangsung tidak benar. Kendati tidak memiliki kekuatan politik golput melakukan gerakan dengan diam.”

Arif Budiman secara tidak langsung mengatakan golput itu adalah hal yang dilakukan seseorang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat pilihanya tidak sah merusak atau mencoblos diluar ketentuan yang ada. Dia juga menghubungkan golput dengan orang yang tidak percaya dengan hasil pemilu dan tidak berpartisipasi orang tersebut bias tidak datang ke TPS atau juga bias datang ke TPS tetapi membuat suara tidak sah.

Perilaku tidak memilih atau lebih dikenal dengan golput merupakan bentuk pilihan yang terbentuk dari pribadi masing-masing yang terbentuk sendiri maupun yang terbentuk dari pengaruh lingkungan lain berdasarkan penjelasan

dan pendapat mengenai golput dari para ahli di atas golput dapat diartikan sebagai suatu gerakan sekelompok orang atau masyarakat atau individu yang tidak menggunakan hak pilihnya. Sekelompok orang atau individu tersebut alasan yang sengaja atau tidak memilih serta memiliki tujuan yang jelas mengenai hal yang dilakukan tersebut dan juga dengan dampak dan akibat yang akan terjadi nantinya. Golput juga sebagai wujud protes politik dikarenakan adanya perasaan yang tidak puas dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan sistem dan objek politik yang ada di sekitarnya.

5. Kategori dan Implikasi Golput

Menurut Mufti Mubarak (Efriza, 2012: 541), bagi masyarakat sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat, golput akan melemahkan legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga pemerintah.

Menurut Eep Saefulloh Fatah (Efriza, 2012: 546) juga telah merangkum sebab-sebab orang untuk golput, diantaranya adalah:

1. Golput Teknis, hal ini dikarenakan sifat teknis berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tak sah, atau tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan teknis pendataan penyelenggara pemilu.

2. Golput politis, hal ini untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pemilihan kepala daerah akan membawa perubahan dan perbaikan.
3. Golput ideologis, yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik-ideologi lain.

Pengelompokan golput ke dalam beberapa kategori juga dikemukakan oleh, Indra J. Piliang (Efriza, 2012: 545) menyatakan bahwa golongan putih (golput) dianggap sebagai bentuk perlawanan atas partai-partai politik dan calon presiden-wakil presiden yang tidak sesuai dengan aspirasi orang-orang yang kemudian golput. Dia membagi golput menjadi 3 bagian yaitu:

1. Golput ideologis, yakni segala jenis penolakan atas apa pun produk sistem ketatanegaraan hari ini. Golput jenis ini mirip dengan golput era 1970-an, yakni semacam gerakan anti-*state*, ketika *state* dianggap hanyalah bagian korporatis dari sejumlah elite terbatas yang tidak punya legitimasi kedaulatan rakyat. Bagi golput jenis ini, produk UU sekarang, termasuk UU pemilu, hanyalah bagian dari rekayasa segolongan orang yang selama ini mendapatkan keistimewaan dan hak-hak khusus. Sistem Pemilu 1999, sebagaimana diketahui, hanyalah memilih tanda gambar sehingga rakyat tidak bisa memilih orang. Demokrasi berlangsung dalam wilayah abu-abu dan semu.

2. Golput pragmatis, yakni golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya.
3. Golput politis, yakni golput yang dilakukan akibat pilihan- pilihan politik. Kelompok ini masih percaya kepada negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka.

Sedangkan menurut Ali (1999: 22), di Indonesia terdapat dua kelompok golput yaitu :

1. Kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.
2. Kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibanding golput awam. Golput pilihan

ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak Cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

Berdasarkan penyelasan mengenai golput di atas, maka dapat disimpulkan golput dalam penelitian ini adalah orang atau masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan namun tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan sengaja serta tujuan yang jelas, sebagai wujud protes politik terkait rasa ketidakpuasan sebagai pemilih disebabkan kepribadian serta orientasi kepribadian pemilih, sistem dan objek politik yang ada disekitarnya serta kalkulasi untung dan rugi.

Yang terdiri atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Golput yang dikarnakan sifat teknis berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara karna urusan pekerjaan, pendidikan dan lain-lain (diluar faktor Ideologis).
2. Golput masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pemilihan kepala daerah akan membawa perubahan dan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Golput masyarakat yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik-ideologi lain.
4. Golput masyarakat yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya.

D. Faktor-Faktor Golput (Pendekatan Golput)

Menurut Efriza (2012: 538-543) mengungkapkan setidaknya ada 4 faktor utama yang dapat menjelaskan masyarakat yang perilaku tidak memilih atau golput sebagai berikut :

1. Faktor psikologi

Efriza, (2012: 538) Menjelaskan golput dari faktor psikologis pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 2 kategori. *Pertama*, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. *Kedua*, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku golput disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Hal itu dikarenakan apa yang diperjuangkan kandidat atau parpol tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun hal itu menyangkut kepentingan yang lebih luas.

Pada konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tidak acuh cenderung untuk tidak memilih. Ciri-ciri dari perilaku golput berdasarkan faktor psikologis ini umumnya diperoleh sejak lahir (bahkan lebih bersifat keturunan). Dan selanjutnya secara konsisten dalam setiap perilaku. Faktor yang lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah keefektifan personal (*personal effectiveness*), yaitu

kemampuan atau ketidak mampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya.

Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitik beratkan faktor orientasi kepribadian. Sherman (Efriza, 2012: 538) Melihat bahwa perilaku golput disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomali dan alienasi. Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan penjelasan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sengaja ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan politik, atau adanya perasaan bahwa aktifitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung.

Anomi menunjukkan pada perasaan tidak berguna. Mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa dan kebijaksanaan politik. Bagaimana para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih, tidak mempengaruhi apa-apa, karena keputusan-keputusan politik sering kali berada di luar kontrol para pemilih. Perasaan *power lessness* inilah yang disebut dengan anomie. Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomie. Aliensi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Bahkan mereka

dianggap sebagai suatu yang mempunyai kosekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternative aksi politik, seperti melalui kerusakan, kekacauan, demonstrasi, dan semacamnya.

2. Faktor sistem politik

Tingsten (Efriza, 2012: 539) menjelaskan ada hubungan antara sistem pemilu atau sistem perwakilan yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap persentase kehadiran dan ketidak hadiran seseorang dalam bilik suara. Hasil studi yang dilakukan Tingsten menyimpulkan, dinegara-negara yang menerapkan sistem pemilu atau sistem perwakilan berimbang, rata-rata jumlah pemilih yang hadir cukup tinggi.

Sementara itu negara yang menerapkan *sistem distrik* jumlah pemilih relatif rendah. Hal ini dikarenakan, dalam sistem perwakilan berimbang perolehan kursi sangat bergantung pada proporsi jumlah suara pemilih. Sementara itu, dalam sistem proporsional mempunyai semangat yang lebih besar memilih betapapun mereka menyadari partai atau dapil, sebab suaranya tidak hilang karena digabungkan dengan perolehan suara didaerah pemilihan lainnya.

Faktor sistem politik berkaitan dengan sistem politik khususnya sistem pemilu secara langsung. Pemilih melakukan perotes terhadap sistem politik dan sistem pemilu terutama kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari

pemerintah. Sistem politik yang dibangun rezim berkuasa saat ini dirasa pemilih tidak mampu membangun demokrasi yang sehat. Sistem pemilu Proporsional juga dinilai tidak menjamin kedekatan antara wakil dan yang terwakili.

3. Faktor Kepercayaan Politik

Pada literatur ilmu politik, konsep kepercayaan oleh para ahli banyak digunakan untuk menjelaskan ketidakaktifan (*inactivity*) seseorang dalam dunia politik. Menurut Khoirudin (Efriza, 2012: 540) fenomena meningkatnya golput harus dipandang dalam dua perspektif. Pertama, munculnya ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai dan kandidat, yang kemudian berakibat pada perspektif kedua, keinginan warga negara untuk melakukan delegitimasi terhadap kekuasaan. Padahal, tanpa legitimasi warga negara sesungguhnya sebuah kekuasaan dapat dianggap tidak ada. Faktor ini sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu ekspresi perasaan keterasingan.

Sedangkan menurut Asfar (Efriza, 2012: 541) golput disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

1. Ketidakhadiran diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada sistem politik, berbeda dengan kehadiran yang sering diinterpretasikan sebagai bentuk “loyalitas” atau kepercayaan pada sistem politik yang ada.

2. Ketidakhadiran pemilih dianggap sebagai reaksi/ekspresi dari ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Asumsi tersebut menyiratkan kondisi bahwa ketidakhadiran pemilih dimaknai sebagai indikator lemahnya legitimasi rezim yang berkuasa.
 3. Ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat.
4. Faktor Latar Belakang Satus Sosial-ekonomi

Setidaknya ada tiga indikator yang bisa digunakan untuk mengukur variabel status sosial-ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie (Efriza, 2012: 543) menyimpulkan “*the best knows about turnout is that citizens of higher social and economics status participate more in politics.*” (yang utama tentang kehadiran bahwa warga negara yang status sosial dan ekonomi lebih berpartisipasi politik). Penjelasan di atas menunjukkan hubungan yang meyakinkan antara tingkat status sosial-ekonomi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih.

Lazimnya, variabel status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku *non-voting*. Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan

berhubungan dengan kehadiran pemilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih.

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, seperti dijelaskan Raymond F Wolfinger dan Steven J. Rosenstone (Efriza, 2012: 543) yaitu :

- a. Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi pada pemilu. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
- b. Para pegawai negeri atau pensiunan, menunjukkan tingkat kehadiran pemilih lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti misalnya kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Begitu pula para pensiunan yang sangat berkepentingan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya tentang besarnya tunjangan pensiun kesehatan, kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan lainnya.
- c. Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut. disamping menginginkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran

maupun pemilihan dalam sebuah tulisannya, Wolfinger dan Rossestone (Efriza, 2012: 543) menjelaskan sebagai berikut: disekolah dan perkuliahan, kita belajar mengenai system politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita, dan diterangkan untuk menekanteman sebayannya untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan, dari mengambil alih takdir kita.

Segala pengaruh ini mempengaruhi kita untuk memberikan suara. Yang kurang berpendidikan dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses politik, ketidak pedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka, dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan mendaftar.

- d. Pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu “para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang latar belakang pendapatan tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu rendah”.

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor penyebab golput di atas, dalam penelitian ini menggunakan empat faktor yakni, faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi sebagai berikut:

1. Faktor psikologis untuk mengetahui penyebab golput yang dilihat dari kepribadian dan orientasi kepribadian. Kepribadian seseorang ini melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, tak acuh, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi atau semacamnya. Apabila dijelaskan secara spesifik, kepribadian seseorang ini berkaitan dengan diri kepribadian pemilih yang terlihat kurang bertanggung jawab, tidak acuh, dan tidak toleran.

Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktifitas politik, merasakan aktivitas politik tidak mempengaruhi peristiwa ataupun kebijakan politik. Menganggap dirinya tidak terlibat dalam urusan politik, dan berpengaruh terhadap kehidupannya. Faktor psikologis dalam penelitian ini diukur dari Minat/keterlibatan dalam persoalan atau aktifitas politik serta sosialisasi dan rangsangan politik dari kandidat.

2. Faktor sistem politik mengetahui penyebab golput yang dilihat dari sistem politik dan sistem pemilu. Faktor sistem pemilu dalam penelitian ini diukur dari: tahap penyelenggaraan teknis pemilu, sosialisasi pemilu, dan kepala daerah yang aspiratif kepada kepentingan rakyat. Sistem politik dalam penelitian ini dikarenakan pemilih kecewa dengan kebijakan dan

implementasi dari pemerintah, pemilih melihat sistem pemilu tidak membawa kepada perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilih kecewa dengan kinerja panitia penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS).

3. Faktor kepercayaan politik mengetahui penyebab golput yang melihat dari ketidakpercayaan dari saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai politik. Faktor ini melihat pemilih yang tidak percaya pada janji politik, kandidat kurang berprestasi, kandidat tidak dekat dengan masyarakat, kemampuan kandidat kurang memadai, pemilih kecewa karena pilihannya tidak ikut berkontes dan lain-lain. Faktor kepercayaan politik dalam penelitian ini diukur dari: Kedekatan kandidat yang berkompetisi, kepercayaan terhadap kandidat Bandar Lampung, dan kompetensi/kapabilitas kandidat.
4. Faktor latar belakang status sosial-ekonomi mengetahui penyebab golput yang dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Faktor latar belakang status sosial-ekonomi dalam penelitian dapat diukur dari tingkat pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dalam pemilu. Tingkat pendapatan, Pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu “para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang latar belakang pendapatan tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu rendah.

Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi pada pemilu. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

E. Kerangka Pikir

Perilaku politik merupakan pikiran dan tindakan seseorang atau masyarakat untuk memberikan suara dalam pemilihan umum yang berkenaan dengan kepentingan atau tujuan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan melaksanakan keputusan politik. konsep perilaku pemilih tersebut menjadi bagian terpenting dalam kehidupan politik khususnya dalam pemilihan langsung. Sebuah pandangan lain yang bertolak belakang dengan konsep tersebut adalah perilaku tidak memilih atau lebih dikenal dengan golongan putih (Golput).

Golput dalam penelitian ini adalah orang atau masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan namun tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan sengaja serta tujuan yang jelas atau sebagai wujud protes politik terkait rasa ketidakpuasan sebagai pemilih disebabkan kepribadian serta orientasi kepribadian pemilih, sistem dan objek politik yang ada disekitarnya serta kalkulasi untung dan rugi. Alasan yang melatar belakangi seseorang menjadi

golput dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan mempengaruhi seseorang untuk golput yang dibedakan atas faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi.

Faktor psikologis untuk mengetahui penyebab golput yang dilihat dari kepribadian. Kepribadian seseorang ini melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, tak acuh, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi atau semacamnya. Apabila dijelaskan secara spesifik, kepribadian seseorang ini berkaitan dengan diri kepribadian pemilih yang terlihat kurang bertanggung jawab, tidak acuh, dan tidak toleran.

Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktifitas politik, merasakan aktivitas politik tidak mempengaruhi peristiwa ataupun kebijakan politik. Menganggap dirinya tidak terlibat dalam urusan politik, dan berpengaruh terhadap kehidupannya. Faktor psikologis dalam penelitian ini diukur dari Minat/keterlibatan dalam persoalan atau aktifitas politik serta sosialisasi dan rangsangan politik dari kandidat.

Faktor sistem politik mengetahui penyebab golput yang dilihat dari sistem politik dan sistem pemilu. dikarenakan kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah, pemilih melihat sistem pemilu tidak membawa kepada perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilih kecewa dengan kinerja panitia penyelenggara pemilu (KPU, PPK, PPS), dan lain sebagainya. Faktor sistem politik

dalam penelitian ini diukur dari: pemahaman tahap teknis penyelenggaraan pemilu, sosialisasi pemilu, netralitas panitia penyelenggara pemilu, dan kepala daerah yang aspiratif kepada kepentingan rakyat.

Faktor kepercayaan politik mengetahui penyebab golput yang melihat dari ketidakpercayaan dari saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai politik. Faktor ini melihat pemilih yang tidak percaya pada janji politik, kandidat kurang berprestasi, kandidat tidak dekat dengan masyarakat, kemampuan kandidat kurang memadai, pemilih kecewa karena pilihannya tidak ikut berkompetisi dan lain-lain. Faktor kepercayaan politik dalam penelitian ini diukur dari: Kedekatan kandidat yang berkompetisi, kepercayaan terhadap kandidat Bandar Lampung, dan kompetensi/kapabilitas kandidat

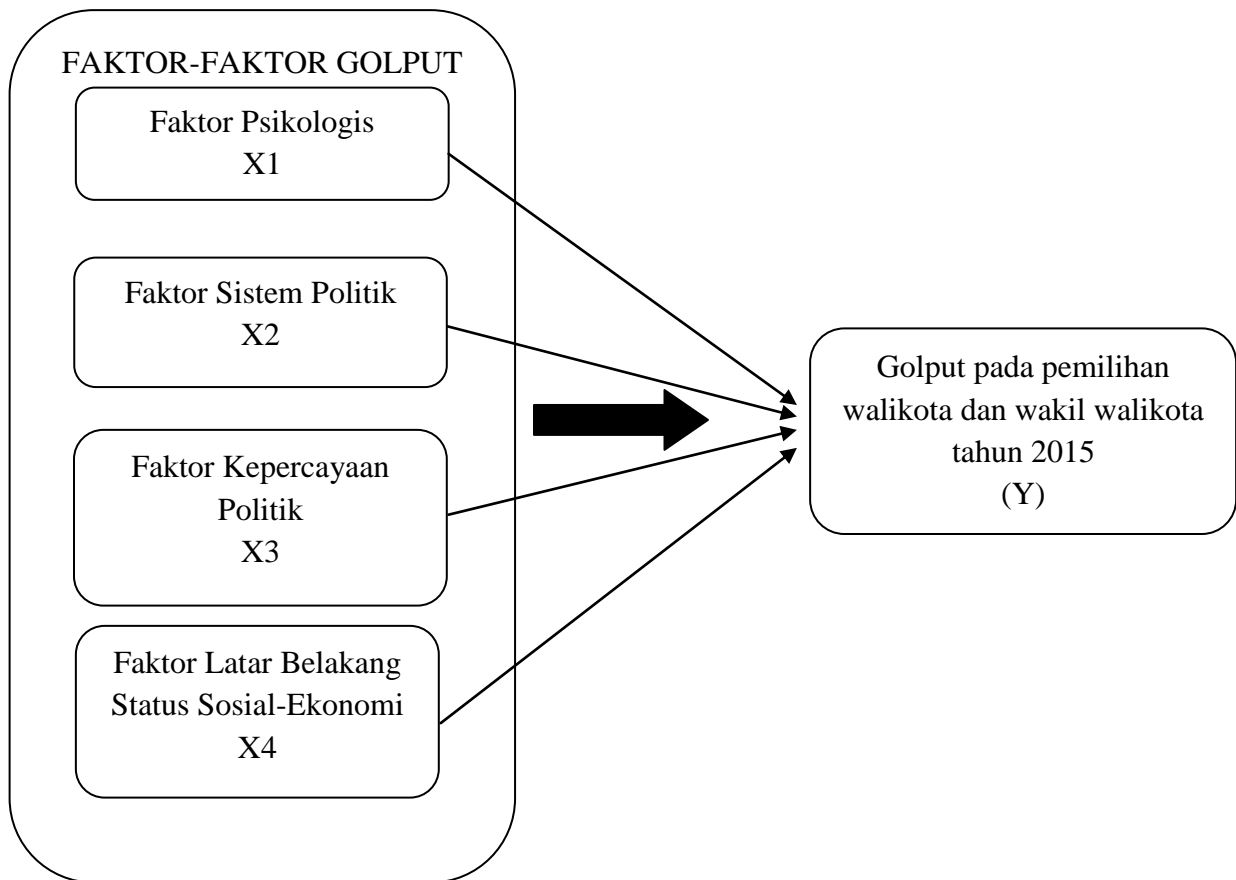
Faktor latar belakang status sosial-ekonomi mengetahui penyebab golput yang dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steve J. Rossettone menunjukkan pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dalam pemilu. pemilih yang pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu “para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi.

Sebaliknya, pemilih yang latar belakang pendapatan tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu rendah. Pemilih yang memiliki pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi dalam pemilu. Para pemilih yang berkerja di lembaga pemerintahan cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilihan dibandingkan dengan pemilih yang berkerja di lembaga yang tidak mempunyai kaitan dengan kebijakan pemerintah.

Sedangkannya alasan golput pemilih dalam penelitian ini terdiri atas golput yang dikarenakan sifat teknis, berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara karna urusan pekerjaan, pendidikan dan lain-lain (diluar faktor Ideologis). Golput masyarakat yang tidak punya pilihan dari kandidat yang tersedia dan pesimistis bahwa pemilu/pemilihan kepala daerah akan membawa perubahan serta perbaikan. Golput masyarakat yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat didalamnya entah karena alasan nilai-nilai agama atau alasan politik-ideologi lain. Golput masyarakat yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih.

Penelitian ini diarahkan untuk melihat pengaruh faktor-faktor penyebab golput terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015. Faktor-faktor tersebut adalah faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi, Adanya masyarakat kelurahan

Kampung Baru yang golput sebesar 46% dapat disebabkan oleh beberapa faktor tersebut dan manakah faktor yang lebih dominan menjadi penyebab golput.



Gambar 1 : Bagan Kerangka Pikir

F. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012: 64) bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka hipotesis pada penelitian ini terbagi atas 2 bagian yaitu:

1. Hipotesis Mayor

H_a : Faktor-faktor penyebab golput berpengaruh terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015.

H_0 : Faktor-faktor penyebab golput tidak berpengaruh terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015.

2. Hipotesis Minor

H_{0-1} : faktor psikologis tidak berpengaruh secara parsial terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015.

H_{a-1} : faktor psikologis berpengaruh secara parsial terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015.

- H₀₋₂: faktor sistem politik tidak berpengaruh secara parsial terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015.
- H_{a-2}: faktor sistem politik berpengaruh secara parsial terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015.
- H₀₋₃: faktor kepercayaan politik tidak berpengaruh secara parsial terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015.
- H_{a-3}: faktor kepercayaan politik berpengaruh secara parsial terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015.
- H₀₋₄: faktor latar status belakang status sosial ekonomi tidak berpengaruh secara parsial terhadap golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015.
- H_{a-4}: faktor latar status belakang status sosial ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap Y golputnya masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015.

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *Explanatory Research*. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa yang dirumuskan. Menurut Mardalis (2004: 26) Penelitian eksplanatori tidak hanya sekedar memberikan gambaran mengenai suatu gejala sosial tertentu yang menjadi fokus perhatian yang ingin dijelaskan, tetapi juga bagaimana hubungannya dengan gejala sosial lainnya, dan mengapa hubungannya seperti itu. Penelitian eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol atau dimanipulasi secara tertentu. Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian pengujian hipotesis yang menguji hubungan sebab akibat diantara variabel yang diteliti.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif jenis *Explanatory Research* untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab golput di kelurahan Kampung Baru pada pemilihan walikota dan

wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015. dengan menggunakan perhitungan variabel tertentu dan indikator tertentu. Dengan tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menunjukkan hubungan serta pengaruh perbandingan antar variabel, mendeskripsikan secara statistik dan menaksir atau meramalkan hasil penelitian.

B. Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan membatasi masalah penelitian tentang hal-hal yang diamati sehingga fokus penelitian menjadi jelas. Menurut Singarimbun (2000: 45) menjelaskan pengertian konseptual yang dimaknai sebagai pemikiran umum mengenai suatu masalah atau persoalan. Adanya konsep untuk mengatasi untuk mengenai variabel atau indikator yang akan diteliti. Definisi konseptual yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor penyebab golput

Faktor-faktor penyebab golput adalah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat pemilih memilih untuk golput dalam pemilihan. Faktor tersebut terdiri atas faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi.

2. Golput

Golput dalam penelitian ini adalah orang atau masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan namun tidak menggunakan hak pilihnya

dengan alasan sengaja serta tujuan yang jelas atau sebagai wujud protes politik terkait rasa ketidakpuasan sebagai pemilih disebabkan kepribadian serta orientasi kepribadian pemilih, sistem dan objek politik yang ada disekitarnya serta kalkulasi untung dan rugi.

C. Definisi Oprasional

Menurut Singarimbun (2000:46) definisi oprasional adalah peruntukan pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Definisi oprasional merupakan oprasionalisasi dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan untuk mengaplikasikanya dilapangan.

Tabel : 5 Definisi Oprasional

Variabel	Sub Variabel	Indikator Variabel	No
Faktor-Faktor penyebab Golput (X)	Faktor Psikologis (X ₁)	1. Minat/keterlibatan dalam persoalan atau aktifitas politik.	1
		2. Sosialisasi dan rangsangan politik dari kandidat.	2
	Faktor Sistem Politik (X ₂)	1. Tahap penyelenggaraan teknis pemilu.	1
		2. Sosialisasi pemilu.	1
		3. Kinerja panitia penyelenggara pemilu.	1
		4. Kepala daerah aspiratif kepada kepentingan rakyat.	1
Faktor Kepercayaan Politik (X ₃)	1. Kedekatan kandidat yang berkompetisi.	1	
	2. Kepercayaan terhadap kandidat pilkada kota Bandar Lampung.	1	
	3. Kompetensi/kapabilitas kandidat.	2	

	Faktor Status Latar Belakang Sosial-Ekonomi X ₄	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latar belakang pendidikan menjadikan pemilih memahami manfaat pilkada. 2. Latar belakang pendapatan. pendapatan yang tinggi mempermudah seseorang untuk mengakses informasi, dapat meluangkan waktu, pilkada membawa dampak pada pendapatan, berkorelasi pada kehadiran dalam pemilu. 3. Latar belakang pekerjaan, pekerjaan-pekerjaan tertentu mempengaruhi seseorang untuk datang pada saat pemilu. 	1 6 2
	Golput (Y)	Tidak memilih dikarenakan berhalangan hadir diluar faktor ideologis (karna urusan pekerjaan, pendidikan dan lain-lain).	1
		Tidak memilih karna masyarakat tidak punya pilihan kandidat lain.	1
		Tidak memilih karna rasa pesimistis pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.	1
		Tidak memilih karna tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang berjalan.	1
		Tidak memilih karna kandidat bersebrangan ideologi (nilai-nilai yang dianut misalnya nilai atau kesamaan agama) dengan pemilih.	1
		Tidak memilih karna kalkulasi rasional (memilih ataupun tidak memilih memiliki dampak sama atas si pemilih)	1

Sumber : Di Olah Oleh Peneliti

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara *purposive* adalah lokasi penelitian di pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dan diambil berdasarkan tujuan penelitian, (Singarimbun, 2000: 169). Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 285) Cara terbaik yang perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian

ialah dengan mempertimbangkan teori substantif dengan menjajaki lapangan untuk melihat kesesuaian dengan kenyataan yang berada di lapangan. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga, perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Alasan peneliti memilih kota Bandar Lampung dikarenakan kota Bandar Lampung merupakan ibukota provinsi Lampung yang memiliki karakteristik masyarakat dengan tingkat sosial-ekonomi yang beragam dan Pilkada bukan lah hal yang baru dilakukan di kota Bandar Lampung. peneliti juga beralasan memilih lokasi penelitian di kelurahan Kampung Baru kota Bandar Lampung karna kelurahan Kampung Baru merupakan daerah pemilihan dengan angka golput yang tertinggi dalam pilkada walikota dan wakil walikota kota Bandar Lampung tahun 2015.

E. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012: 80) populasi adalah wilayah generalisi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyaikualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditari kesimpulanya. berdasarkan penjelasan tersebut, populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan objek yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian.

Populasi dalam penelitian ini berada di 3 (tiga) TPS, diambilnya tiga TPS sebagai lokasi populasi sampel dikarenakan ketiga TPS tersebut merupakan TPS

yang memiliki angka golput tertinggi di kelurahan Kampung Baru. Selain itu juga mempertimbangkan teori substantif dan mempertimbangkan kepraktis penelitian seperti waktu, biaya, dan tenaga. Adapun TPS tersebut yaitu TPS 2 sejumlah 290 pemilih golput, TPS 5 sejumlah 327 pemilih golput, dan TPS 11 sejumlah 286 pemilih golput maka Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 899.

Menurut Sugiyono (2012: 91). Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sampel digunakan bila peneliti tidak memungkinkan meneliti keseluruhan populasi dan karna adanya keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, digunakan rumus Teknik *Solvin* pengambilan sampel untuk populasi yang sudah diketahui (Siregar, 2013: 34) adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1}$$

Keterangan:

n : Banyaknya sampel

N : Jumlah populasi

d : Tarif nyata (0,10)

1 : Bilangan Konstant

$$\frac{889}{889.(0,10)^2 + 1} = \frac{889}{889.(0,10)^2 + 1} = \frac{889}{9,99} = 89,9 = 90$$

Maka dengan rumus tersebut banyaknya sampel yang dibutuhkan 90 orang dan didistribusikan ke tiga TPS yang memiliki angka golput tertinggi sebagai berikut:

Tabel : 6 Distribusi Sampel

TPS	RT	RW	Golput per TPS	Jumlah Populasi golput	Sampel
2	1 dan 2	1,2 dan 3	290	899	$(290/899) \times 90 = 29$
5	3,4, dan 5	1,2 dan 3	327	899	$(327/899) \times 90 = 32,7 = 33$
11	4 dan 5	1,2 dan 3	282	899	$(282/899) \times 90 = 28,2 = 28$
Total sampel					90

Sumber: Di Olah Oleh Peneliti

Dalam penelitian ini penentuan responden penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan responden secara tidak acak, tetapi dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Untuk memilih sampel dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*). Kuesioner dibagikan kepada responden dengan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan responden dimana sebelum kuesioner dibagikan terlebih dahulu telah ditentukan responden-responden yang akan menjawab kuesioner pada masing-masing TPS.

Adapun kriteria dan pertimbangan tertentu tersebut ialah masyarakat Kampung Baru yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) pilwakot tahun 2015 namun tidak menggunakan hak pilihnya (Golput). Prosedur dalam pemilihan responden secara *purposive sampling* ini dilakukan dengan cara mula-mula

peneliti mendatangi ketua RT dari TPS-TPS yang telah terpilih sebagai lokasi penelitian yaitu TPS 2, TPS 5, dan TPS 11. Selanjutnya peneliti meminta rekomendasi dari ketua RT-RT tersebut nama-nama masyarakat Kampung Baru yang golput dalam pilwakot tahun 2015. Kemudian jika nama-nama yang telah didapat belum mampu memenuhi 90 jumlah sampel yang dibutuhkan. Peneliti akan meminta rekomendasi dari nama-nama yang telah terpilih tadi untuk merekomendasikan orang lain, begitulah prosedur penentuan sampel dalam penelitian sampai memenuhi populasi sampel yang berjumlah 90.

F. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian menurut lofland dan lofland dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 169) ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik sumbernya terbagi dalam :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, data primer didapat langsung dengan informasi atau responden yang berkaitan langsung dengan pilkada walikota Bandar Lampung tahun 2015 yang tidak memilih. Data ini merupakan hasil penyebaran daftar pertanyaan atau kuesioner dan hasil wawancara tidak terstruktur. Berdasarkan permasalahan dari objek penelitian maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan

Kampung Baru yang berjumlah 90 orang sebagai sampel yang telah ditetapkan dalam daftar pemilih tetap dalam pilkada kota Bandar Lampung tahun 2015.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dengan mencari sumber data dan informasi melalui buku-buku, literature, jurnal, dokumen-dokumen, internet dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

G. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian maka pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Kuesioner

Pengumpulan data utama dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan daftar-daftar pertanyaan berbentuk kuesioner kepada responden. Sugiyono (2012: 142) koesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada kepada responden untuk dijawab. Lembaran yang berisi beberapa pertanyaan dengan struktur yang baku pertanyaan-pertanyaan tersebut berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan koesioner terstruktur atau tertutup, koesioner tersebut berisi pertanyaan beserta pilihan jawaban, kemudian pertanyaan tersebut di sebarakan kepada responden yaitu masyarakat kelurahan Kampung Baru yang berjumlah 90 orang sampel.

2. Wawancara/Interview

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk menunjang data utama yang didapat dari kuesioner. Tujuan wawancara ini agar memperoleh informasi lebih mendalam mengenai masalah penelitian. Wawancara dalam penelitian ini tidak terstruktur agar bisa menggali lebih mendalam terkait perilaku tidak

memilih atau golput masyarakat kelurahan Kampung Baru dalam pilkada walikota Bandar Lampung tahun 2015. Informan yang akan diwawancarai dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti dengan kriteria informan yang memiliki pengetahuan yang cukup dengan tema penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 236). Sumber data lain dapat berupa informasi dan dokumen yang berhubungan dengan lokasi penelitian. Sumber dokumen dalam penelitian ini berupa buku monografi dan profil kelurahan Kampung Baru, artikel, surat kabar, pustaka, Undang-Undang Sebutkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

H. Teknik Pengolahan Data

Setelah data-data yang diperoleh dari lapangan terkumpul. Maka tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Editing data, adalah proses dimana peneliti melakukan keterbacaan, konsistensi data yang sudah terkumpul. Proses keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisis. Sedangkan hasil konsistensi mencakup keajekan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan, sehingga kelengkapan yang mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap dapat yang digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian.
2. Koding adalah tahapan untuk mengklarifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut macamnya. Klarifikasi itu dilakukan dengan jalan menandai masing-masing jawaban itu dengan kode tertentu biasanya dalam bentuk huruf-huruf. Setelah jawaban di klarifikasikan menurut jenis pertanyaan dan diberi kode. Kemudian dipindahkan ke dalam tabel kode.
3. Tabulasi adalah tahap memasukan data kuesioner ke dalam tabel-tabel agar dapat dibaca diinterpretasikan secara kuantitatif. Maksud dari tabulasi adalah agar jawaban responden dikelompokkan secara teratur dan sistematis tampak ringkas. Tahap ini dilakukan peneliti dengan menyusun data yang diperoleh

dari lapangan ke dalam bentuk tabel sehingga pembaca dapat melihat dan memahami dengan mudah.

4. Interpretasi data yaitu data yang telah dideskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang diinterpretasikan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. Tahapan ini dilakukan peneliti untuk member penafsiran atau enjabaran data yang ada pada tabel untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban responden dengan hasil lainnya serta dokumentasi yang ada.

I. Teknik Penentuan Skor

Skala dapat mengurutkan responden-responden ke dalam urutan ordinal dengan lebih tepat karena dalam proses tersebut diperhatikan intensitas bobot dari tiap pertanyaan (Singarimbun, 2008: 113). Dalam kuesioner setiap pertanyaan akan diberi 4 (empat) alternatif jawaban yaitu a, b, c, dan d dengan skor masing-masing. Responden diminta untuk memilih salah satu alternatif jawaban yang ada. Untuk setiap jawaban diberi skor masing-masing jawaban sebagai berikut:

Bagi responden yang memilih jawaban a, diberi skor 4

Bagi responden yang memilih jawaban b, diberi skor 3

Bagi responden yang memilih jawaban c, diberi skor 2

Bagi responden yang memilih jawaban d, diberi skor 1

J. Uji Validitas dan Uji Reabilitas

Validitas dan reabilitas instrumen merupakan dua hal yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena dua hal tersebut merupakan karakter utama yang menunjukkan suatu alat ukur dapat dikatakan baik atau tidak baik. Validitas dan Reabilitas perlu diketahui sebelum dipergunakan dalam pengambilan data agar kesimpulan penelitian nantinya tidak keliru dan tidak memberikan gambar yang jauh berbeda keadaan sebenarnya

1. Uji Validitas Instrumen

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner yang berisikan pertanyaan yang ditunjukkan pada responden tertentu. Menurut Arikunto (2010: 160) validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Data yang valid memberikan ukuran dan gambar yang cermat sesuai dengan yang diinginkan.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 16. Aplikasi SPSS 16 ini membantu mempercepat penghitungan tingkat validitas tanpa menggunakan rumus *product moment* seperti yang ada di atas. Apabila nilai r_{xy} (r hitung) lebih besar dari pada r tabel, maka item soal tersebut dapat dikatakan valid dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Jika nilai r_{xy} (r hitung) lebih kecil dari pada r tabel, maka item soal tersebut dapat

dikatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. Setelah itu, dipergunakan koefisien korelasi untuk menginterpretasikan tingkat validitasnya.

Hasil uji validitas instrumen item-item penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. validitas variabel faktor-faktor penyebab golput.

Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Nilai Sig.	Keterangan
1	0,861	0,000	Valid
2	0,562	0,000	Valid
3	0,666	0,000	Valid
4	0,727	0,000	Valid
5	0,729	0,000	Valid
6	0,638	0,000	Valid
7	0,431	0,000	Valid
8	0,744	0,000	Valid
9	0,544	0,000	Valid
10	0,637	0,000	Valid
11	0,465	0,000	Valid
12	0,616	0,000	Valid
13	0,650	0,000	Valid
14	0,702	0,000	Valid
15	0,513	0,000	Valid
16	0,738	0,000	Valid
17	0,652	0,000	Valid
18	0,505	0,000	Valid
19	0,393	0,000	Valid
20	0,534	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 1 Di Olah Pada Tahun 2016

Tabel 8. validitas variabel golput

Item Pertanyaan	Koefisien Korelasi	Nilai Sig.	Keterangan
1	0,285	0,007	Valid
2	0,572	0,000	Valid
3	0,333	0,001	Valid
4	0,576	0,000	Valid
5	0,621	0,000	Valid
6	0,539	0,000	Valid

Sumber : Lampiran 1 Di Olah Pada Tahun 2016

Berdasarkan tabel 7 dan 8 di atas, serta jika merujuk pada pengujian validitas instrumen dengan ketentuan jika nilai Sig. < α dengan nilai $\alpha = 0,5$ dan koefisien korelasi $\geq 0,207$. Nilai 0,207 merupakan nilai r tabel pada taraf signifikan 5% dengan jumlah sampel 90. maka dapat dikatakan instrumen tersebut valid. Oleh karna itu berdasarkan uji validitas instrumen penelitian ini sebagaimana tertera di atas yaitu tabel 7 dan tabel 8 maka dapat diketahui bahwa semua pertanyaan memiliki koefisien korelasi $\geq 0,207$ dan nilai Sig. < 0,05. Dengan demikian dapat di disimpulkan bahwa semua pertanyaan mengenai indikator-indikator dalam variabel faktor-faktor penyebab golput dan variabel golput masyarakat Kampung Baru pada instrumen yang digunakan dikatakan sah dan valid.

2. Uji Realibitas Instrumen

Reliabilitas instrumen menurut Arikanto (2010:170) adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Sementara instrumen yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat di percaya. Instrumen yang dapat dipercaya apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Uji reabilitas instrumen dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbachs*.

Pengolahan data dalam uji reliabilitas ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS 16. Aplikasi ini membatu mempercepat penghitungan tingkat Reabilitas tanpa menggunakan rumus manual *Alpha Cronbachs*. Setelah didapat hasilnya, langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan hasil yang diperoleh dengan cara mengartikan indeks korelasi sebagai berikut:

Tabel 9. Nilai Interpretasi Reliabel

Besarnya Nilai r	Interprestasi
0,00-0,20	Kurang Reliabel
0,21-0,40	Agak Reliabel
0,41-0,60	Cukup Reliabel
0,61-0,80	Reliabel
0,81-100	Sangat Reliabel

Sumber : Singarimbun, Masri dan Efendi Arikunto (2000:122)

Hasil uji reabilitas instrumen item-item penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Reabilitas instrumen penelitian

Variabel		Nilai Alpha Cronbach	Keterangan
X	X ₁	0,776	Reliabel
	X ₂	0,520	Cukup Reliabel
	X ₃	0,384	Agak Reliabel
	X ₄	0,765	Reliabel
Y		0,362	Agak Reliabel

Sumber : Lampiran 2 Di Olah Pada Tahun 2016

Berdasarkan hasil penghitungan reabilitas instrumen yang dimuat pada tabel 10 di atas, diketahui bahwa Nilai Alpha Cronbach untuk variabel X faktor-faktor penyebab golput yaitu faktor Psikologis (X₁) sebesar 0,776, faktor Sistem Politik (X₂) sebesar 0,520, faktor Kepercayaan Politik (X₃) 0,387 dan latar belakang status sosial-ekonomi (X₄) sebesar 0,765 dan variabel golput masyarakat Kampung Baru sebesar 0,362. dengan syarat sebagai berikut jika nilai koefisien Alpha Cronbach 0,00-0,20 termasuk nilai yang kurang reliabel, 0,21-0,40 termasuk nilai yang agak reliabel, 0,41-0,60 termasuk nilai yang cukup reliabel, 0,61-0,80 termasuk nilai yang reliabel dan 0,80-1,00 termasuk nilai yang sangat reliabel. Dengan demikian dapat, disimpulkan instrumen penelitian yang digunakan memiliki tingkat reabilitas dari agak reliabel sampai reliabel dan dinyatakan layak untuk digunakan dalam proses pengumpulan data.

K. Teknik Analisa Data

Menurut Basrowi dan Suwandi (2008: 91) analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan suatu uraian dasar yang sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis tabel tunggal. Analisis tabel tunggal merupakan suatu analisis yang dilakukan dengan membagi-bagi variabel penelitian ke dalam kategori-kategori yang dilakukan atas dasar frekuensi. Tabel tunggal merupakan langkah awal dalam menganalisis kolom-kolom yang merupakan sejumlah frekuensi dan persentase untuk setiap kategori.

Selanjutnya untuk mengetahui persentase jawaban responden menggunakan rumus persentase berikut ini:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Sumber : Soerjono Soekanto (2006:286)

Keterangan :

P : presentase

F : frekuensi pada klarifikasi kategori yang bersangkutan

N : jumlah frekuensi dari seluruh Klarifikasi/Kategori

Penelitian ini akan mendeskripsikan hasil jawaban responden terkait pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Hasil rekapitulasi jawaban responden dimasukkan ke dalam tabel yang berisikan frekuensi dan presentase. Rekapitulasi jawaban responden terbagi-bagi berdasarkan tiap pertanyaan penelitian. Frekuensi dan persentasi yang ada dalam tabel tersebut dideskripsikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat penjelasan dan analisis singkat. Setelah semua pertanyaan di masukan ke dalam tabel dan dideskripsikan secar masing-masing.

L. Analisis Kuantitatif

Untuk membuktikan dan menguji Hipotesis, maka data dan informasi yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, kemudia akan dikelola dan dianalisis dengan menggunakan SPSS 16.

1. Uji t (Pengaruh Parsial)/Uji Hipotesis Minor

Koefisien regresi parsial digunakan untuk menunjukkan apakah variabel-variabel bebas memiliki pengaruh secara parsial (terpisah atau sendiri-sendiri) terhadap variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t tebel dengan nilai hasil uji t tabel *Coefficients*.

Pernyataan hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$H_{0-1} = t_{hitung} < t_{tabel} ; X_1 \text{ tidak berpengaruh secara parsial terhadap } Y.$$

$$H_{a-1} = t_{hitung} > t_{tabel} ; X_1 \text{ berpengaruh secara parsial terhadap } Y.$$

$$H_{0-2} = t_{hitung} < t_{tabel} ; X_2 \text{ tidak berpengaruh secara parsial terhadap } Y.$$

$$H_{a-2} = t_{hitung} > t_{tabel} ; X_2 \text{ berpengaruh secara parsial terhadap } Y.$$

$H_{0-3} = t_{hitung} < t_{tabel}$; X_3 tidak berpengaruh secara parsial terhadap Y.

$H_{a-3} = t_{hitung} > t_{tabel}$; X_3 berpengaruh secara parsial terhadap Y.

$H_{0-4} = t_{hitung} < t_{tabel}$; X_4 tidak berpengaruh secara parsial terhadap Y.

$H_{a-4} = t_{hitung} > t_{tabel}$; X_4 berpengaruh secara parsial terhadap Y.

2. Uji Regresi Berganda dan Persamaan Regresi Berganda

Menurut Nazir (1988:529) analisis regresi berganda bertujuan untuk mempelajari bagaimana eratnya hubungan antara satu atau beberapa variabel independen dengan sebuah dependen variabel dengan menggunakan persamaan regresi berganda. Pada uji regresi berganda ini, data di regresikan dengan bantuan SPSS 16. Setelah diregresikan, maka akan diperoleh koefisien regresi yang terdapat pada tabel *Coefficient* kolom *Unstandarizet Coefficients*. Nilai ini dapat digunakan untuk membuat persamaan regresi berganda hasil penelitian.

3. Uji F

Dalam regrasi ganda terdapat tabel *Anova* yang berisi nilai F. Nilai F tersebut disebut nilai F hitung dan dapat digunakan untuk melihat apakah serangkaian variabel bebas secara serentak mempengaruhi variabel terikat. Nilai F hitung di bandingkan dengan nilai F tabel.

Kriteria untuk menguji adalah:

$H_0 = F_{hitung} < F_{tabel}$; terima H_0 dan tolak H_a ; variabel $X_1, X_2, X_3,$ dan X_4 secara serentak tidak memengaruhi variabel Y .

$H_0 = F_{hitung} > F_{tabel}$; tolak H_0 dan terima H_a ; variabel $X_1, X_2, X_3,$ dan X_4 secara serentak memengaruhi variabel Y .

selain dengan membandingkan nilai F , pengujian hipotesis dapat juga dilakukan dengan menggunakan nilai Sig . Pada *Anova*, Nilai Sig .penelitian = 0,05 dibandingkan dengan nilai Sig .hitung. kriteria untuk mengujinya adalah:

$H_0 = Sig_{hitung} > Sig_{penelitian}$; terima H_0 dan tolak H_a ; variabel $X_1, X_2, X_3,$ dan X_4 secara serentak tidak memengaruhi variabel Y .

$H_a = Sig_{hitung} < Sig_{penelitian}$; tolak H_0 dan terima H_a ; variabel $X_1, X_2, X_3,$ dan X_4 secara serentak memengaruhi variabel Y .

4. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Untuk melihat besarnya pengaruh yang terjadi antara faktor-faktor penyebab golput dengan golput. Uji R^2 digunakan untuk menunjukkan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian dengan menggunakan SPSS 16. Untuk menentukan nilai R^2 , dengan melihat hasil output nilai R^2 yang semakin besar (mendekati satu) menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas (X) yang besar terhadap variabel terikat (Y). Sebaliknya jika R^2 yang semakin kecil (semakin mendekati nol) maka

dikatakan pengaruh variabel (X) terhadap variabel terikat (Y) adalah kecil. Karena itu letak R^2 berada dalam selang (interval) antara 0 dan 1. Secara aljabar dinyatakan $0 \leq R^2 \leq 1$. Berikut merupakan pedoman interpretasi Koefisien Korelasi :

Tabel 11. Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Besarnya Nilai r	Interprestasi
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2010:183)

IV. GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung, terletak antara $3^{\circ}45'$ - $6^{\circ}45'$ lintang selatan dan $103^{\circ}40'$ - $105^{\circ}50'$ bujur timur, merupakan wilayah di Pulau Sumatera, yang berbatasan di sebelah utara dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah selatan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat dengan Samudra Indonesia.

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Propinsi Lampung, selain merupakan pusat kegiatan Pemerintahan, Sosial Politik, Pendidikan dan Kebudayaan, juga merupakan pusat kegiatan perekonomian, yang secara ekonomis menguntungkan pertumbuhan dan pengembangan kota Bandar Lampung, yaitu sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Dengan letaknya yang strategis, di mana Propinsi Lampung sebagai daerah lalu lintas dan transit berbagai kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Hal ini menjadikan Kota Bandar Lampung berkembang cukup pesat dalam wilayah Propinsi Lampung.

Luas wilayah Kota Bandar Lampung 197,22 km² yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 98 Kelurahan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, Kota Bandar Lampung saat ini menjadi 20 kecamatan dengan 126 kelurahan.

Tabel 12. Nama Kecamatan, Ibukota, Jumlah Kelurahan, dan Luas Wilayah Kota Bandar Lampung per-Kecamatan (km²)

No	Kecamatan	Ibukota	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Teluk Betung Barat	Bakung	6	8,89
2	Teluk Betung	Sukaraja	10	7,30
3	Panjang	Panjang Selatan	7	21,16
4	Tanjung Karang	Kota Baru	10	6,15
5	Teluk Betung Utara	Kupang Kota	5	9,37
6	Tanjung Karang	Palapa	7	5,31
7	Tanjung Karang	Gedong Air	6	15,14
8	Kemiling	Sumberejo	6	25,02
9	Kedaton	Kampung Baru	7	5,26
10	Rajabasa	Rajabasa	4	13,02
11	Tanjung Senang	Tanjung Senang	4	11,63
12	Sukarame	Sukarame	6	14,75
13	Sukabumi	Sukabumi	6	11,64
14	Labuhan Ratu	Labuhan Ratu	6	5,62
15	Wayhalim	Way halim	6	2,12
16	Langkapura	Langkapura	5	2,63
17	Enggal	Enggal	6	3,00
18	Kedamaian	Kedamaian	7	14,18
19	Teluk Betung Timur	Teluk betung	6	12,10
20	Bumi Waras	Bumi Waras	6	2,93

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung 2013

2. Gambaran Umum Kelurahan Kampung Baru

a. Sejarah Kelurahan Kampung Baru

Kelurahan Kampung Baru merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Kedaton, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 3 Oktober 2001 tentang Penggabungan, Penghapusan dan Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung. Semula kelurahan dalam wilayah Kota Bandar Lampung berjumlah 84 Kelurahan dari 9 Kecamatan, dan sejak tanggal 29 Desember 2001 Kota Bandar Lampung menjadi 98 Kelurahan dari 13 Kecamatan, dan Kelurahan Kampung Baru termasuk dalam Kecamatan Kedaton.

Tujuan dari pemekaran kecamatan adalah dalam rangka peningkatan kegiatan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil serta merupakan sarana bagi pembinaan wilayah dan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan, juga sebagai sarana untuk memperpendek rentang kendali pelayanan kepada masyarakat.

Dengan ditetapkannya dan disyahrkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tanggal 3 Oktober 2001 Tentang Pemekaran Wilayah Kecamatan dan Kelurahan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kelurahan Kampung Baru termasuk di dalam Kecamatan Kedaton dan Pejabat Lurahnya adalah Khoirumas berdasarkan Surat Keputusan Walikota

Bandar Lampung Nomor: 821.23/03/02/2001 Tanggal 01 Februari 2001. Selanjutnya sejak tanggal 3 Mei 2003 dilantik Kenedi Danial S.IP. Menjadi Lurah di Kelurahan Kampung Baru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 821.23/01/05/2003 Tanggal 3 Mei 2003. Tahun 2015 jabatan lurah Kampung Baru dijabat oleh Sukiman B.A.

Penyebaran penduduk di Kelurahan Kampung Baru secara umum merata di semua tempat dan banyak berdirinya rumah kos (sewaan) di Kelurahan Kampung Baru sebagai imbas dari Wilayah Kelurahan Kampung Baru sebagai sentra pendidikan tinggi, seperti adanya Kampus Universitas Lampung dan Perguruan Tinggi lainnya.

b. Letak Geografis

1) Batas wilayah

Kelurahan Kampung Baru memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Kelurahan Gudung meneng

Sebelah selatan : Kelurahan Labuhan Ratu Raya

Sebelah timur : Kelurahan Raja Basa

Sebelah barat : Kelurahan Labuhan Ratu

Sumber: profil kelurahan Kampung Baru tahun 2015

c. Keadaan Demografi

1) Kelurahan Kampung Baru kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung memiliki 2 lingkungan keluarga yang terdiri dari 8 RT dan 24 RW

2) Komposisi penduduk menurut jenis kelamin

Jumlah laki-laki	: 2871
Jumlah penduduk perempuan	: 2936
Jumlah KK	: 1376
Jumlah penduduk	: 5807

3) Komposisi penduduk menurut usia

Jumlah penduduk berusia 0-15 tahun	: 917
Jumlah penduduk berusia 16-55 tahun	: 394
Jumlah penduduk berusia di atas 55 tahun	: 956

4) Komposisi penduduk menurut pekerjaan

Petani	: 2
Buruh Swasta	: 53
Peternak	: 3
Wirasuwasta	: 69
Montir	: 65
Tukang kayu	: 16
Tukang sumur	: 8

Penjahit	: 18
PNS	: 243
Pensiunan	: 286
TNI/Polri	: 17
Perangkat kelurahan	: 30
Karyawan swasta	: 546
Pengrajin	: 7
Industri kecil	: 18
Buruh Industri	: 32
Lain-lain	: 756

5) Kondisi sosial politik

4.1. Agama

Islam	: 5643
Kristen	: 76
Protestan	: 34
Katolik	: 42
Hindu	: 12
Budha	: -

4.2. Sarana dan Prasarana

Kantor Kepala Desa	: 1
Gedung SMA/SMK	: 1
Gedung SMP	: 1

Gedung SD	: 2
Gedung TK	: 1
Masjid	: 6
Musolah	: 3
Puskesmas	: 1
Puskesmas pembantu	: 2
Posyandu	: 2
Poskamling	: 12

4.3. Pemerintahan umum

Pelayanan Kependudukan	: Ada
Pelayanan pemakaman	: Ada
Perijinan	: Ada
Ketentraman dan ketertiban umum	: ada

Sumber: profil kelurahan Kampung Baru tahun 2015

d. Visi dan Misi

Visi : --

Misi :

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat.
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.

3. Pengembangan dan memperkuat ekonomi. untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, masyarakat yang agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah.
4. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah yang baik, bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha.

d. Pilkada walikota dan wakil walikota kota Bandar Lampung tahun 2015 di kelurahan Kampung Baru.

Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota kota Bandar Lampung tahun 2015 di kelurahan Kampung Baru dilaksanakan di 12 TPS dengan jumlah pemilih sebesar 4890 dengan pengguna hak suara 2.198 (44% partisipasi pemilih) dan pemilih yang tidak menggunakan hak suara atau golput 2.782 (56% golput), suara yang sah 2169 dan suara yang tidak sah 29. Terdapat 3 (tiga) TPS yang tercatat dengan angka golput tertinggi yakni TPS 2 sebanyak 290 (76,7% golput), TPS 5 sebanyak 327 (74,4% golput) dan TPS 11 sebanyak 282 (67% golput).

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab golput berpengaruh terhadap golputnya masyarakat Kampung Baru pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015 di kelurahan Kampung Baru, kecamatan Labuhan Ratu, kota Bandar Lampung. Arah korelasi yang terjadi adalah positif artinya semakin besar pengaruh faktor-faktor penyebab golput yang terjadi pada diri seorang golput maka golputnya cenderung semakin besar. Keempat faktor-faktor penyebab golput berpengaruh karena berada didalam diri seseorang yang golput. Faktor-faktor tersebut berasal dari perasaan (faktor psikologis), sistem yang berjalan (sistem politik), kepercayaan (kepercayaan politik), dan keadaan sosial ekonomi (faktor latar belakang status sosial-ekonomi).
2. Besarnya pengaruh faktor-faktor penyebab golput terhadap golputnya masyarakat Kampung Baru pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015 di kelurahan Kampung Baru, kecamatan

Labuhan Ratu, kota Bandar Lampung adalah 48,2% dan sisanya yaitu 51,8% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.

3. Faktor-faktor penyebab golput yang paling berpengaruh terhadap golputnya masyarakat Kampung Baru pada pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015 di kelurahan Kampung Baru, kecamatan Labuhan Ratu, kota Bandar Lampung adalah faktor kepercayaan politik. Golput dalam penelitian ini merupakan orang atau masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan namun tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan sengaja serta tujuan yang jelas atau sebagai wujud protes politik terkait rasa ketidakpuasan sebagai pemilih disebabkan kepribadian serta orientasi kepribadian pemilih, sistem dan objek politik yang ada disekitarnya serta kalkulasi untung dan rugi. Faktor kepercayaan politik muncul akibat dari ketidakpercayaan seorang yang golput terhadap saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai politik.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, peneliti memberikan saran terkait pengaruh faktor-faktor penyebab golput terhadap golputnya masyarakat Kampung Baru sebagai berikut:

1. Terkait faktor sistem politik dan faktor kepercayaan politik politik penyebab golput.
 - a. tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu dan partai politik sangat minim saat ini, sehingga hal ini perlu diperhatikan oleh semua wakil-wakil rakyat maupun partai-partai politik. Hendaknya semua calon-calon yang sudah terpilih yang sudah memperoleh kedudukan harus menunjukkan perilaku yang baik dan melakukan pendekatan yang baik kepada masyarakat serta menepati janji-janjinya kepada masyarakat pada saat berkampanye. Jangan memberikan janji-janji hanya pada saat masa kampanye saja. Akan tetapi semua wakil-wakil rakyat beserta partai politik yang mengusungnya harus benar-benar menjalankan semua program-program kerjanya dengan baik yang mereka berikan pada saat kampanye mereka berlangsung.
 - b. Kepada para peserta pemilu jangan melakukan pencitraan menjelang pemilu. Sebaiknya jaga selalu sikap, *performance* dan *profesionalitas* dengan aktif di masyarakat yang diistilahkan investasi diri jauh sebelum pemilu. Partai politik agar selalu melakukan pembenahan di

internal dengan memilih calon berdasarkan pengkaderan jangan memilih calon dadakan untuk mendapatkan simpati masyarakat dalam tujuan memenangkan pemilu.

2. Terkait faktor psikologis dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi. Yaitu kepada masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Kampung Baru hendaknya lebih sadar apa arti hak pilih, karena masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang tahu akan hak sebagai warga Indonesia. Karena ditangan mereka (masyarakat) dapat menentukan maju atau tidaknya daerah tersebut. Maka sebab itu masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam pilkada.
3. Kepada penyelenggara pemilu, keberadaan masyarakat yang golput dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bandar Lampung tahun 2015 di kelurahan Kampung Baru dapat dikatakan cukup besar, perlu dilakukan sosialisasi bidang pendidikan pemilih kepada masyarakat seperti pemahaman untuk selalu tetap menyadari akan pentingnya keikutsertaan atau berpartisipasi dalam pemungutan suara, memberikan suara berdasarkan hati nurani, tanpa dipengaruhi oleh janji-janji para calon.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Novel. 1999. *Peradaban Komunikasi Politik*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik (Edisi RevisiI)*.PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Basrowi, M. dan Suwandi. 2008. *Memahami penelitian kualitatif*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Cangara, Hafied. 2011. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Efriza. 2012. *Political explore : Sebuah kajian ilmu politik..* Alfabeta. Bandung.
- Gaffer, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi press. Jakarta.
- Harahap.2005, *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*. Cidesindo. Jakarta.
- Kristiandi, J. 1997. *Menyelenggarakan pemilu yang bersifat luber dan jurdil*. CSIS. Jakarta.
- Mahandra, A. A. Oka. 2005. *Prilaku Ditegah Konflik Horizontal*.Millenium Publisher. Jakarta.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pahmi, Sy. 2010. *Politik Pencitraan*. Gaung Persada Press. Jakarta.

- Pasolong, Harbani. 2010. *Kepemimpinan Birokrasi*. Alfabeta: Bandung.
- Prihatmoko, joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I press. Semarang.
- Samit, Arbi. 1992. *Golput: Aneka Pandangan Fenomena Politik*. Pustaka sinar harapan. Jakarta.
- Singarimbun, Masri Dan Sofyan Efendi. 2000. *Metode Pelelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada media Group
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & B*. Alfabeta. Bandung.
- Suwandi dan Basrowi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rinika Cipta. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono.2006. *Pengantar Sosiologi*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Universitas Lampung 2012. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Lampung: Penerbit Universitas Lampung.

Skripsi

- Yatarullah. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kehadiran Dan Ketidakhadiran Pemilih Di Tps (Voter Turn-Out) Pada Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Kampar*. KPU Kampar. Riau
- Prisina, Rike. 2014. *Fenomena Golongan Putih Di Kalangan Mahasiswa Pada Pemilihan Umum Legeslatif Tahun 2014*: penerbit Universitas Lampung
- Setiawan, Arie.2012. *Perilaku Golput Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Desa Waringin Barat Kecamatan Sukorojo Kabupaten Prengsewu*: penerbit Universitas Lampung.

Dokumen

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Media

<http://www.kpu-bandarlampung.go.id> diakses pada (5 Januari 2015 jam : 16:00 WIB)